

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERIODE TAHUN
2025**



PT BPR HAYURA ARTALOLA

**JL. Raya Pasirjambu No.139 Kab.Bandung
Tlp: 022-5928680
www.bprhayura.co.id**

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERIODE RENCANA BISNIS 2025
PT BPR HAYURA ARTALOLA**

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayainya, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu perbankan sangat diperlukan dan menjadi sendi penting dalam perekonomian nasional. Dengan kondisi perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian jika dibandingkan dengan perbankan lainnya. BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah, Keberadaan BPR pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediary mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan Tabungan dan Deposito juga menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Dalam realisasi rencana Bisnis tahun 2025 masih dihadapkan pada berbagai kendala secara makro ekonomi terjadi pelemahan daya beli masyarakat yang begitu berpengaruh pada perkembangan usaha BPR, bank umum dan lembaga lain terutama pinjaman online, yang begitu ketat namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Usaha-usaha yang dilakukan management dalam rangka mengembangkan bank di tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan secara kualitas dan kuantitas dengan indikator terjadi terjadi pertumbuhan volume usaha sebesar 7% dimana pada posisi Desember 2024 sebesar Rp.45.142.354.707.- menjadi sebesar Rp.50.916.562.223,- di Desember 2025 kenaikan volume usaha berkontribusi adanya pertumbuhan Kredit yang diberikan sebesar 11% ini berdampak pada kenaikan laba usaha di tahun 2025 sebesar 60%, hal ini juga dampak adanya anomali pendapatan bunga dari perubahan SAK ETAP menjadi SAK EP dari flat to Eir secara annuitas yang berlaku sejak 1 Januari

2025 Sesuai POJK nomor 1 tahun 2024. Dari Sisi Pasiva penghimpunan dana tabungan tumbuh 9% dan deposito 5% sedangkan Pinjaman antar bank tumbuh 26%.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini tentunya harus tetap dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan terutama dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini yang cenderung tetap mengalami perubahan yang tentunya harus diantisipasi dengan kebijakan dan strategi perbankan yang lebih hati-hati lagi terutama dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat baik antar BPR , bank umum maupun lembaga pembiayaan yang lainnya. di tahun 2025 perekonomian secara makro masih dihadapkan pada situasi yang belum begitu membaik ditengah situasi geo politik global dengan terjadinya perang timur tengah, berpengaruh secara cukup signifikan, dan secara domestik perkembangan masih belum stabil.

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat kinerja terbaik seluruh stakeholder melalui pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga customer BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

1. Umum

Susunan Kepengurusan PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

Dewan Komisaris :

Komposisi Kepengurusan untuk Dewan direksi dan komisaris efektif tanggal 14 Januari 2025 telah ditata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas jasa keuangan dengan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris

1. H. Mutiq Yusmita Hadyat selaku Komisaris Utama
2. Tatan Suratman selaku Komisaris

Direksi :

1. Teulis Ratna Komala selaku Direktur Utama
2. Usep Subhan selaku Direktur Kepatuhan Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

1. Tito Tinarsa, SE selaku Kepala Bagian Marketing
2. Selfi Setiawati,S.kom selaku Kepala Bagian Kepatuhan dan Mangement Resiko
3. Dadi Riyadi Rudinasyah selaku Kepala Bagian Operasional
4. Rizky Akbar Firdaus, selaku Audit Internal.
5. Yayan Taryana, selaku Kepala Bagian Supervisi
6. Dania Mulyati, selaku Kepala Bagian Umum dan SDM

Ringkasan Riwayat Hidup Anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif.

DEWAN DIREKSI

DIREKTUR UTAMA

1. Nama : Teulis Ratna Komala
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 23 Maret 1971
Alamat : Ciwidey Kulon Rt. 01/13 Ciwidey Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta sebagai Direktur Operasional PT BPR Hayura Artalola.
Alamat Pekerjaan : Jl Raya Ciwidey Pasirjambu No,139 Ciwidey Kabupaten Bandung.

Latar Belakang Pendidikan

- 1977 – 1983 : SDN 1, Ciwidey
1983 – 1987 : SMPN 1, Ciwidey
1987 – 1990 : STM Negeri Penerbangan Bandung
1991- 1992 : Administrasi Perkantoran, Bandung
2003 – 2006 : STIE AKPI, D3 Management Dana Bank, Bandung

Pendidikan & Pelatihan

- 1992 : Komputer Akuntansi
1997 : Pelatihan Manajemen Perbankan , Intern
1998 : Pelatihan TOF PHBK (Training Of Fasilitator Pola Hubungan Bank dengan Kelompok), Bank Indonesia.
1999 : Pelatihan Leadership , Bank Indonesia.
2000 : Bisnis Plan, Bank Indonesia.

Pengalaman Kerja

- 1991 : Asuransi Bumi Putera sebagai Agen, Bandung
1992 – 1993 : Marketing, PT BPR Hayura
1993 – 1994 : Pembukuan, PT BPR Hayura
1994 – 1995 : Kepala Bagian Umum, PT BPR Hayura
1995 – 1997 : Kepala Bagian Adm & Umum, PT BPR Hayura
1997 – 2024 : Direktur Operasional dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT BPR Hayura Artalola
2024 - Sekarang : Menjabat sebagai Direktur utama

DIREKTUR OPERASIONAL/YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

2. Nama : Usep Subhan
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 25 Desember 1971
Alamat : Komplek Sukarasa Permai Blok B No. 46 Rt.01/18 Desa Tenjolaya Kec Pasirjambu Kab. Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Latar Belakang Pendidikan

- 1978 – 1984 : SDN Nenon, Ciwidey
- 1984 – 1987 : SMPN I, Ciwidey
- 1987 – 1990 : SMAN Baleendah, Baleendah
- 2005 – 2008 : STIE/Dharma Negara, Program D3 Jurusan Management Keuangan Perbankan .

Pelatihan dan Kursus

- 1991 : Advance Englis Course, Harvard Englis
- 1992 : Computer Course Firdaus Computer Course
- 1993 : Managemen BPR. In House
- 1996 : Pejabat BPR , Bank Indonesia Bandung
- 1998 : Managemen Keuangan Mikro, Bank Indonesia
- 1999 : Rapid Rural Apraisal, Bank Indonesia
- 2000 : Exposure Training Problem, Bank Indonesia
- 2001 : Pelatihan Pejabat BPR, Perbarindo
- 2003 : Penanganan Kredit Bermasalah, Perbarindo & Bank Indonesia.
- 2003 : Teknologi Informasi Lembaga Keuangan Mikro, PT PNM
- 2004 : Internet bagi BPR, PT PNM
- 2005 : Penanganan Kredit Bermasalah, Bank Indonesia
- 2006 : Penyusunan Rencana Bisnis, Balancing Score Card, Perbarindo.
- 2009 : AR & Collection Team
- 2010 : Human Skill Improvemen
- 2011 : Penyusunan Program Audit & laporan Bagi Audit Internal PNM & SAK Etap, Bank Indonesia.
- 2012 : Audit Internal, Perbarindo & APU PPT.
- 2013 : Leadership Team Building. In House
- 2014 : Sertifikasi Direktur 1, Certif oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro.
- 2019 : Survailen Serifikasi Direktur 1
- 2024 : Survailen Serifikasi Direktur 1

Pengalaman Bekerja

- 1993 – 1996 : Marketing . PT BPR Hayura Artalola
- 1996 - 1998 : Bagian dana. PT BPR Hayura Artalola
- 1998 – 2000 : Kepala Bagian Dana, PT BPR Hayura Artalola
- 2000 – 2003 : Kepala Bagian Kredit, PT BPR hayura Artalola
- 2003 - 2005 : Kepala Bagian Operasional , PT BPR Hayura Artalola.
- 2005 - 2008 : Audit Internal .
- 2018 - 2024 : Kepala Bagian Kepatuhan dan Managemen Resiko.
- 2025 – Sekarang : Direktur Kepatuhan Yang membawah fungsi Kepatuhan

PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN DAN MANAGEMEN RESIKO

- 3. Nama : Selfi Setiawati,S.Kom
- Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 09 Juni 1990
- Alamat : Kp.Warung No 40 RT 02/03 Desa Tenjolaya Kec Pasirjambu Kab Bandung.

Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Latar Belakang Pendidikan

1996 – 2002 : SDN Pelag, Majalaya
1984 – 1987 : SMPN I P:acet , Majalaya
1987 – 1990 : SMAN I Baleendah, Baleendah
2008 – 2011 : LPKIA, Program D3 Manajemen Informatika
2011-2012 : LPKIA, Program S1 Sistem Informasi

Pelatihan dan Kursus

2015 : Aplikasi Manajemen Risiko Opearasiona, Meta Vision
2018 : Leadershi training the champion mindset, Meta Vision
2016 : Service Excellence,Dedi Santika
2016 : Service Secret, Markplus
2016 : Team Work Buiding, Outback
2020 : Aplikasi Perlindungan Konsumen, OJK
2025 : Efektifitas Penerapan GCB, Perbarindo

Pengalaman Bekerja

2013 : Marketing, Bank BTpN
2013-2104 : Teller, BPR Hayura Artalola
2014-2016 : Admin Kredit, BPR Hayura Artalola
2016-2020 : CS, BPR Hayura Artalola
2020-2024 : Kepala Kantor Kas

KEPALA BAGIAN OPERASIONAL

4. Nama : Dadi Riyadi Rudiansyah
Tempat/tgl Lahir : Bandung, 25 April 1997
Alamat : Kp. Sukagalih Rt.01 Rw.04 Desa-Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Kepala Bagian Operasional

Latar Belakang Pendidikan

2003 – 2009 : SDN , Cisondari 1
2009 – 2012 : SMPN I, Ciwidey
2012 – 2015 : SMAKN 1, Katapang
2015 – 2018 : LPKIA , Jurusan Teknik Informatika, Bandung

Pelatihan dan Kursus

2019 : Workshop Hardware dan Software
Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah
Pelatihan APU & PPT
2020 : Pelatihan Manajemnet Resiko
Pelatihan Team Managing Umprovement
2021 : Pelatiha Perencanaan Keuangan Mikro
2022 : Pelatihan Digital Leadership Memperkuat Transformasi
Digital.

Pengalaman Kerja
2018 : PT Layanan Media
2018 : IT Suport, PT BPR Hayura Artalola
2020 : Kepala Seksi Back Office, PT BPR Hayura Artalola
2022- Sekarang : Kepala Bagian Operasional, PT BPR hayura Artalola

INTERNAL AUDIT

5. Nama : Rizky Akbar Firdaus
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 26 Oktober 1981
Alamat : Ciloa I Rt.03/06 Desa Panyocokan Kcec.Ciwidey Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Audit Internal

Latar Belakang Pendidikan

1988 – 1993 : SDN Ciwidey Kota, Ciwidey
1993 – 1996 : MTSN Albasyariah, Bandung
1996 – 1999 : SMAN Ciwidey
2018 – 2021 : STIEB , D3 Akuntansi

Pelatihan dan Kursus

2009 : Pengelolaan Kredit Bermasalah, BI
2010 : Human Skill Improvment, Outback
2010 : Marketing Inovations Training, PNM
2011 : Penajaman Analisis Kredit Pembiayaan UMKM, BI
2012 : Managing For Improvement Performance, PT Bisma
2012 : APU & PPT, Metha Vision
2012 : Service Exxelent, Outback
2014 : Konsulatif Selling, Markplus
2015 : Credit And Collteral Execution Law, Hadisaputro Law Office
2016 : Optimalisasi Analisa Kredit, Perbarindo
2018 : Melaksanakan Fungsi SK /PEAI, CV Meta Dinamika
2019 : Hak Tanggungan Tanah Elektronik, Ikatan Pejabat Akta tanah

Pengalaman Bekerja

2008 – 2011 : Assisten Marketing, PT BPR Hayura Artalola
2011 - 2013 : Analis Kredit.PT BPR Hayura Artalola
2013 - 2017 : A/0 Wilayah, PT BPR hayura Artalola
2028 -2019 : Team Leader
2019- 2022 : Koordinator Wilayah
2024 -Sekarang : Internal Audit, PT BPR- Hayura Artalola

KEPALA BAGIAN MARKETING

6. Nama : Tito Tinarsa,SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 13 Januari 1971
Alamat : Jl Manggahang I No. 13 Rt.02/05 Kel Manggahang Kec Baleendah Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : PE Kepatuhan dan Management Resiko

Latar Belakang Pendidikan

1977 – 1983 : SDN Pelita, Bandung
 1983 – 1986 : SMPN 28, Bandung
 1986 – 1989 : SMAN 11, Bandung
 1989 – 1997 : STEIB/Widyatama, Program S1 Jurusan Akutansi.

Pelatihan dan Kursus

2002 : Manajemen Pengeloaan Dana, PT PNM
 2004 : Fitur Aplikasi LKMS Online, PT PNM
 2005 : Selling Skill, BCA
 2006 : Penyusunan Rencana Bisnis, PT Bisma

Pengalaman Bekerja

1998 – 2009 : ICS. PT BPR Hayura Artalola
 2009 - 2013 : Unit Manager Dayeuh Kolot, PT PNM
 2013 – 2014 : Koordinator manager Unit, BMT Sanama
 2014 – 2015 : Kepala Cabang ,PT BPR Ukabima
 2016 - 2018 : Kepala Bagian Kredit , PT BPR Hayura Artalola
 2018 - 2022 : Internal Audit
 2022- 2024 : PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 2024 -Sekarang : Kabag Marketing

KEPALA BAGIAN UMUM DAN SDM

7. Nama : Dania Mulyati
 Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 22 Januari 1982
 Alamat : Kp Warung Rt.02/002 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
 Pekerjaan : Pegawai Swasta, PT BPR Hayura Artalola
 Jabatan : Kepala Bagian Umum dan SDM

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar Yang Dicapai
Sekolah Dasar	1989-1995	SDN Cihanjavar	-	-
Sekolah Menengah Pertama	1995-1998	SMPN 1 Ciwidey	-	-
Sekolah Menengah Umum	1998-2001	SMAN 1 Ciwidey	-	-
Akademi/ Perguruan Tinggi	2001-2002	D1 (Lembaga Pendidikan)	Komputer Akutansi	-

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	PERUSAHAAN	JABATAN
2003-2009	PT BPR Hayura Artalola	Teller
2009-2013	PT BPR Hayura Artalola	Admin Support Kredit
2013-2014	PT BPR Hayura Artalola	Head Teller
2014-2018	PT BPR Hayura Artalola	Kasie Front Office
2018	PT BPR Hayura Artalola	Kepala Bagian Umum & Personalia

PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

NAMA PELATIHAN	TAHUN	PENYELENGGARA	LOKASI
Aplikasi Manajemen Risiko Operasional, Risiko Hukum & Risiko Kepatuhan	2015	MethaVision	PT BPR Hayura Artalola
Team Work Building My Job My Adventure	2016	Out Act	Cikole Lembang
Service Excellent	2016	Metha Vision	Kantor PT.BPR HAYURA ARTALOLA
Service Secret	2016	MarkPlus	Bandung

KEPALA BAGIAN SUPERVISI

- 8. Nama** : Yayan Taryana
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 11 Nopember 1973
Alamat : Kp Sukasari Lio Rt.03/01 Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT BPR Hayura Artalola
Jabatan : Kepala Bagian Supervisi

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/Jurusan	Lulusan/Gelar
SD	1979-1985	SDN Babakan Tiga		
SMP	1985-1988	SMP PGRI Ciwidey		
SMU	1988-1991	SMA Soreang Putera		
Akademi/Perguruan Tinggi	2014-2019	STIE DNBS	Manajemen	S/D Sekarang

PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus	Tahun	Penyelenggara	Lokasi
Kursus Komputer	1994	LPK PRAMEDIA	Bandung
Pelatihan Kerja P3T	1998	KOPKAR BMT ASSALAM	Bandung
Menangani Pembiayaan Bermasalah	2005	PNM	Bandung
Proses Dan Prosedur Pemberian Kredit Yang Sehat Pada BPR	2007	PT BISMA	Garut
Perlindungan Konsumen, Revisi Perjanjian Kredit & Penyusunan SOP Perlindungan Konsumen	2014	Methavision	Ciwidey
Aplikasi Manajemen Risiko Operasional, Risiko Hukum & Risiko Kepatuhan	2015	Methavision	Ciwidey
Kualitas Pelayanan Prima (Service Excellent)	2016	Methavision	Ciwidey
Team Work Building PT BPR Hayura	2016	OUT ACT	Lembang
Collection & Penyelamatan Kredit	2017	Bank BJB	Cirebon
Leadership Training (The Champions Mindset)	2018	MINDSET INDONESIA	Ciwidey

RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi
1998	PT BPRS TOAT	MARKETING	Marketing Lending & Funding	
1998-1999	PT BPR BALI RUKUN MANDIRI	MARKETING KREDIT	Monitoring, Marketing Lending & Funding	
1999-2018	PT BPR HAYURA ARTALOLA	TEAM LEADER	Pelaksana Koordinator AO, Pemasaran Kredit & Monitoring Nasabah	
2018	PT BPR HAYURA ARTALOLA	KEAPAL BAGIAN KREDIT	Fungsi Pengawasan Bagian Bisnis	
2022	PT BPR HAYURA ARTALOLA	KEPALA BAGIAN SUPERVISI	Fungsi Pengawasan Bagian Kolektion	

Komposisi Kepemilikan Saham PT BPR Hayura Artalola terdiri dari :

Sesuai dengan akta notaris 4 yang disahkan oleh kemenhumkan nomor AHU-0077380.AH.01.02 TAHUN 2025, bahwa perubahan anggaran dasar mengenai modal disetor dari Rp 5.000.000.000 (dua milyar rupiah) menjadi sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Dan komposisi saham BPR menjadi:

No	Nama Pemilik	Jumlah lembar	Jumlah Nominal	Persentase
1	Hj. Gusti Nurmahrita	22.380	1.119.000.000	50,86%
2	H. Mutiq Yusmita	20.540	1.027.000.000	46,68%
3	Teulis Ratna Komala	540	27.000.000,00	1,22%
4	Tatan suratman	540	27.000.000,00	1.22%
Jumlah		44.000	2.200.000.000	100,00%

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut “Bank” yang didirikan di Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa perbankan didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura Artalola sesuai dengan akta Notaris No. 6 pada Notaris Komar Andasasmita, SH dan telah memperoleh persetujuan atau pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538.HT.01.01.TH.91

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat, BPR Hayura Berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola dan telah di daftarkan ke kantor Kemenhukam sesuai Akta Perubaha Anggaran Dasar No. 14 Tangal 21 Pebruari 2024 dengan surat persetujuan Kemenhukam Nomor AHU 0012239.AH.02.TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola tanggal 23 Pebruari 2024.

PT BPR Hayura mulai beroperasi pada tanggal 17 Juli 1991 dengan alamat Kantor Jl. Siliwangi Ciwidey Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat tanggal 31 Januari 1994 No. 218 pada Notaris Adjie Subandi Dharma.,SH mengubah nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor : C2-12.814.HT.01.04.th.95.

Kantor Operasional Bank Perkreditan Rakyat berlokasi di Jl Raya Pasirjambu No. 139 Desa dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan alamat kantor kas di Jl. Raya Soreang-Banjaran No. 179 Kabupaten Bandung dan Jl. Raya Rancabali KM 7 No. 1 Ciwidey Bandung.

Untuk lebih lengkapnya laporan keuangan tahunan ini dapat dijabarkan melalui perbandingan-perbandingan dengan Neraca dan Laba/rugi tahun lalu.

LAPORAN KEUANGAN /NERACA					
PT BPR HAYURA ARTALOLA					
Yoy Des'24 VS Des 25 & Pencapaian RBB Des'25					
POS-POS	Des'24	Des'25	RBB Des'25	Growth	RBB'26
Kas dalam Valuta Asing	58,770,200	248,220,600	214,372,846	76%	116%
Surat Berharga					
Penempatan pada Bank Lain	7,181,727,025	8,188,877,263	6,124,261,240	12%	134%
-/- CKPN Penempatan Antar bank	1,827,492	5,860,252	4,929,405	69%	119%
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	36,791,059,977	41,266,758,615	39,805,500,742	11%	104%
-/-Provisi belum diamortisasi	487,287,071	431,857,116	473,024,995	-13%	91%
Biaya Transaksi belum diamortisasi	3,113,463	50,475	-	-6068%	100%
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dlm rangka restrukturisasi	19,926,640	20,368,706	-	2%	100%
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	3,843,040	42,032,018	-	91%	100%
-/- CKPN Kredit yang diberikan	295,199,649	433,500,924	380,730,216	32%	114%
Agunan yang diambil alih					
Aset Tetap dan Inventaris	2,422,812,886	2,515,943,215	2,523,012,886	4%	100%
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1,334,971,975	1,497,678,424	1,490,280,184	11%	100%
Asset Pajak Tangguhan	-	33,089,525	-	100%	0%
Aset Tidak Berwujud					
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai					
Aset Antarkantor					
Aset Lainnya	827,927,023	1,094,919,970	1,312,751,660	24%	83%
Total Aset	45,142,354,707	50,916,562,223	47,630,934,574	11%	107%
LIABILITAS					
Liabilitas Segera	270,876,773	929,656,010	79,943,481	71%	1163%
Simpanan					
a. Tabungan	19,350,395,975	21,165,792,952	20,936,323,705	9%	101%

-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi					
b. Deposito	9,247,600,000	9,729,600,000	9,617,030,630	5%	101%
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi					
Simpanan dari Bank Lain	4,300,000,000	5,800,000,000	5,198,382,283	26%	112%
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi					
Pinjaman yang Diterima	4,130,131,338	2,528,874,924	3,331,943,310	-63%	76%
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	24,055,388	13,745,936	-	-75%	100%
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	39,999,988	22,857,136	-	-75%	100%
Dana Setoran Modal-Kewajiban					
Liabilitas Antarkantor					
Liabilitas Lainnya	164,886,120	214,814,320	660,010,412	23%	33%
TOTAL LIABILITAS	37,399,834,830	40,332,135,134	39,823,633,821	7%	101%
EKUITAS					
Modal Disetor					
a. Modal Dasar	5,000,000,000	8,000,000,000	5,000,000,000	8%	160%
b. Modal yang Belum Disetor -/-	2,800,000,000	5,800,000,000	2,800,000,000	52%	207%
Tambahan Modal Disetor					
a. Agio/Disagio					
b. Modal Sumbangan					
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas					
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya					
Ekuitas Lain					
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual					
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap					
c. Lainnya					
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain					
Cadangan					
a. Umum	440,000,000	440,000,000	440,000,000	0%	100%
b. Tujuan					
Laba (Rugi)					
a. Tahun - Tahun Lalu	3,360,000,000	3,497,458,876	3,360,000,000	4%	104%
b. Tahun Berjalan	1,742,519,877	4,446,968,213	1,807,300,753	61%	246%
TOTAL EKUITAS	7,742,519,877	10,584,427,089	7,807,300,753	27%	136%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45,142,354,707	50,916,562,223	47,630,934,574	11%	107%

LAPORAN LABA/RUGI					
PT BPR HAYURA ARTALOLA					
Yoy Des'24 VS Des 25 & Pencapaian RBB Des'25					
POS-POS	Des'24	Des'25	Angg Des'25	Growth	RBB'26
Pendapatan Operasional	11,062,413,732	16,282,046,864	11,906,263,745	32%	37%
1. Pendapatan Bunga					
a. Bunga Kontraktual	9,716,516,133	13,497,370,823	10,511,12,405	28%	128%
i. Surat Berharga					
ii. Penempatan pada Bank Lain					
<i>Giro</i>	30,624,851	30,766,320	26,131,261	0%	118%
Tabungan	27,687,012	32,758,292	29,526,385	15%	111%
Deposito					
Sertifikat Deposito					
iii. Kredit yang Diberikan					
Kepada Bank Lain					
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	9,658,204,270	13,433,846,211	10,455,468,759	28%	128%
b. Provisi Kredit					
i. Kepada Bank Lain					
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	478,967,396	565,261,742	487,762,973	15%	116%
c. Biaya Transaksi -/-					
i. Surat Berharga					
ii. Kredit yang Diberikan					
Kepada Bank Lain					
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	859,869	676,400	774,843	-27%	87%
d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-					
2. Pendapatan Lainnya	867,790,072	2,220,090,699	908,149,210	61%	244%
a. Pendapatan Jasa Transaksi	5,997,106	4,818,895	538,974	-24%	894%
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing					
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga					
d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4,077,800	5,009,427	4,773,360	19%	105%
e. Pemulihan CKPN	573,923,902	1,910,351,906	564,461,592	70%	338%
f. Lainnya	283,791,264	299,910,471	338,375,284	5%	89%
Beban Operasional	8,945,052,918	10,716,859,145	9,697,997,303	17%	111%
1. Beban Bunga					
a. Beban Bunga Kontraktual	1,752,241,108	1,863,203,777	1,757,550,619	6%	106%
i. Tabungan	507,948,730	535,490,109	539,317,746	5%	99%
ii. Deposito	497,127,798	516,464,137	501,507,830	4%	103%
iii. Simpanan dari bank Lain	408,662,133	418,384,011	351,742,532	2%	119%

iv. Pinjaman yang Diterima					
1) Dari Bank Indonesia					
2) Dari Bank Lain	253,448,266	303,073,519	296,489,922	16%	102%
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank					
4) Berupa Pinjaman Subordinasi					
v. Lainnya	85,054,181	89,792,001	68,492,589	5%	131%
b. Biaya Transaksi					
i. Kepada Bank Lain	6,013,929	10,309,452	3,214,958	42%	321%
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank					
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	3,843,037	38,884,768	377,255	90%	10307%
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai	539,083,785	2,062,347,339	697,908,500	74%	296%
a. Surat Berharga					
b. Penempatan pada Bank Lain	67,241,276	72,311,423	74,115,270	7%	98%
c. Kredit yang Diberikan					
i. Kepada Bank Lain					
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank					100%
4. Beban Pemasaran	118,924,635	89,984,700	138,879,330	-32%	65%
5. Beban Penelitian dan Pengembangan					
6. Beban Administrasi dan Umum					
a. Beban Tenaga Kerja	5,013,564,382	5,112,526,139	5,402,643,443	2%	95%
i. Gaji dan Upah	4,439,772,515	4,586,176,139	4,796,252,275	3%	96%
ii. Honorarium	555,541,867	510,450,000	585,356,295	-9%	87%
iii. Lainnya	18,250,000	15,900,000	21,034,873	-15%	76%
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	156,339,198	184,472,695	150,773,420	15%	122%
c. Beban Sewa	75,257,725	77,792,961	78,283,800	3%	99%
i. Gedung Kantor	63,492,368	67,224,435	63,642,600	6%	106%
ii. Lainnya	11,765,357	10,568,526	14,641,200	-11	72%
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	180,863,699	162,706,482	186,625,845	-11%	87%
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud					
f. Beban Premi Asuransi	224,986,979	208,777,419	241,002,453	-8%	87%
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	347,387,805	338,516,114	413,533,603	-3%	82%
h. Beban Barang dan Jasa	376,970,809	419,194,348	457,849,444	10%	92%
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	19,011,782				
j. Kerugian Terkait risiko operasional					
a. Kecurangan internal					
b. Kecurangan External					

i. Pajak-Pajak	-	12,830,000	24,780,626	100%	52%
7. Beban Lainnya			-		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing					
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga					
c. Lainnya	63,322,769	63,001,528	70,458,737	-1%	89%
Laba (Rugi) Operasional	2,117,360,814	5,565,187,719	2,208,266,442	62%	252%
Pendapatan Nonoperasional	79,687,350	5,738,877	18,895,651	-1289%	30%
1. Keuntungan Penjualan					
a. Aset Tetap dan Inventaris	53,999,998	-	-		
b. AYDA					
2. Pemulihan Penurunan Nilai					
a. Aset Tetap dan Inventaris					
b. AYDA					
3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi					
4. Bunga Antarkantor					
5. Selisih Kurs					
6. Lainnya	25,687,352	5,738,877	18,895,651	-348%	30%
Beban Nonoperasional	73,798,514	83,920,719	81,997,994	12%	102%
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan					
a. Aset Tetap dan Inventaris					
b. AYDA					
2. Kerugian Penurunan Nilai					
a. Aset Tetap dan Inventaris					
b. AYDA					
3. Bunga Antarkantor					
4. Selisih Kurs					
5. Lainnya	73,798,514	83,920,719	81,997,994	12%	102%
Laba (Rugi) Non operasional	5,888,836	78,181,842	63,102,343	108%	124%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2,123,249,650	5,487,005,877	2,145,164,099	61%	256%
Taksiran Pajak Penghasilan	365,425,000	1,073,127,189	337,863,346	66%	318%
Pendapatan Pajak Tangguhan					
Beban Pajak Tangguhan	-	33,089,525	-		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1,757,824,650	4,446,968,213	1,807,300,753	60%	246%
Penghasilan Komprehensif Lain					
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap					
b. Lainnya					
c. Pajak Penghasilan Terkait					

1. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual					
b. Lainnya					
c. Pajak Penghasilan Terkait					
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	1,757,824,650	4,446,968,213	1,807,300,753	60%	246%

Laporan Aktivitas Usaha Tahun 2025

Penghimpunan Dana

Simpanan

Pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga melalui produk simpanan yaitu dari Tabungan dan Deposito mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 9% untuk tabungan dan Deposito 5% dari perolehan yang sama di tahun lalu yang sebabkan adanya pengalihan dana dalam bentuk investasi yang lain menjadi simpanan seiring dengan terus bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap PT BPR Hayura Artalola disamping adanya strategis aktivasi produk-produk tabungan, dengan jumlah Simpanan sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp.30.553.354,- ribu.

Jumlah penyimpan sampai Desember 2025 adalah sebanyak 8.768 orang yang terdiri dari Penabung 8.556 orang dan Deposan sebanyak 182 orang.

Pinjaman Yang Diterima

Pada anggaran tahun 2025 dana yang berasal dari linkage dengan Bank Perekonomian Rakyat Karyajatnika Sadaya dengan skim pemberian kredit modal kerja sebesar Rp. 2.528.874.924,00. Perolehan dana dari pinjaman yang diterima menunjukkan penurunan 63% dari tahun sebelumnya.

Penyaluran Dana

Kredit Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan melalui kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pelaku usaha Mikro posisi akhir tahun Desember 2025 sebesar Rp. 41,266,758,615,00 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 8% dari perolehan yang sama di tahun lalu, ini disebabkan adanya kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga yang tersalurkan melalui produk kredit yang diberikan meskipun kondisi perekonomian belum begitu membaik.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Tingkat pengembalian atas pinjaman yang diberikan posisi Desember 2025 mengalami perbaikan kualitas kredit sebesar 0,13 % dari posisi yang sama tahun lalu dari sebesar 97,53 % menjadi 97,60 %, dengan tingkal NPL gros 2.41% dan Nett 1.48%, KAP 1.62%

Kualitas Aktiva Produktif dengna pencapain tersebut diatas merupakan perbaikan kinerja penanganan kredit bermasalah dan juga adanya write off di Desember 2025.

Tahapan penyesuaian atas debitur-debitur yang bermasalah terus diupayakan baik dilakukan secara pendekatan personal maupun melibatkan pihak ketiga yang berpengaruh terhadap debitur ataupun melakukan penghapusbukuan sesuai prosedur yang berlaku atau bahkan dengan eksekusi jaminan.

Secara umum dapat diuraikan bahwa penyebab utama terjadinya kredit bermasalah paling banyak disebabkan oleh kegagalan usaha yang diakibatkan seperti gagal panen, melemahnya daya beli masyarakat dan penyebab-penyebab lain pengalihan rencana penggunaan dana yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan rencana awal,

Pendapatan dan Biaya

Pendapatan

Pendapatan yang berhasil diperoleh selama tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 16.282.046.864,00 terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yakni sebesar 32% ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan akibat terjadinya diberlakukannya SAKEP per 1 Januari 2025 sehingga pendapatan operasional meningkat signifikan khususnya dari pendapatan bunga pinjaman yang sebelumnya ftaf menjadi EIR secara annuitas.

Biaya- Biaya

Biaya secara keseluruhan pada tahun 2025 Rp. **10.716.859.145,00** mengalami peningkatan sebesar 17% dibanding tahun lalu, hal ini dikarenakan adanya kenaikan-kenaikan pada komponen beban biaya CKPN yang mulai berlaku efektif di Januari 2025 yang sebelumnya beban PPKA, juga biaya biaya yang mendukung kegiatan operasional.

Secara garis besar pengeluaran atau beban dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Beban administrasi dan umum Rp.6.516.816,- ribu merupakan komponen pembiayaan terbesar dengan alokasi sebesar 60.8% dari total beban mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun lalu, dalam beban administrasi dan umum ini termasuk komponen beban personalia dan beban-beban sehubungan dengan barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional yang mengalami kenaikan disebabkan adanya penyesuaian pendapatan karyawan karena kenaikan UMR dan masa kerja karyawan.
2. Beban bunga dengan alokasi sebesar Rp. 1.863.204 Ribu atau 17,4 % dari total beban operasional keseluruhan, yang terdiri dari beban bunga dana antar bank dan dana-dana dari pihak ketiga berupa beban bunga Tabungan dan beban bunga Deposito terjadi kenaikan sebesar 5% dan 4%% karena jumlah penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kenaikan.

Beban Penyisihan Aktiva produktif CKPN juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp. 2.062.347.339 atau 74% dari posisi yang sama tahun lalu sebagai dampak dari perberlakukannya CKPN yang sebelumnya PPKA/PPAP, namun dari sisi pemulihan CKP diperoleh Rp. 1.910.351.906 atau meningkat 70% dibanding tahun lalu sehingga neto beban dibanding pemulihan CKPN sebesar Rp. 151.995 ribu penambahan beban CKPN>

Dengan hasil yang diperoleh dari sisi pendapatan naik sebesar 32% dan beban naik 17% dari tahun lalu, maka laba yang dihasilkan di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.565.187.719 sebelum pajak terjadi terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan sebesar 62% dari perolehan tahun lalu hal ini tak lepas dari dampak diberlakukannya SAK EP yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga EIR annuitas.

Dari laba tersebut dicadangkan untuk pembayaran Pajak PPH Pasal 25 Badan sebesar Rp.1.073,127,189 . Sehingga laba bersih yang diperoleh di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.446.968.213,00

- **Perbandingan Rasio Permodalan**

	Des'25	Des'24
$\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} =$	$\frac{10.758.093.337}{30.806640.179} = 34,92\%$	$\frac{7.043.093.000}{27.365.723.000} = 25,73\%$

Jika menganalisa rasio ini BPR mengalami kenaikan rasio CAR sebesar 9,19 % disebabkan adanya peningkatan ekspansi kredit sehingga rasio CAR mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan.

- **Kualitas Aktiva Produktif** dengan dengan dua indikator perbandingan dengan rincian sebagai berikut :

	Des'25	Des'24
1. $\frac{\text{Aktiva Yg Diklas}}{\text{Aktiva Produktif}} =$	$\frac{691.149.136}{43.967.710.534} = 1.57\%$	$\frac{691.149.136}{43.967.710.534} = 1,57\%$
2. $\frac{\text{CKPN Telah Dibentuk}}{\text{CKPN Wjb Dibentuk}} =$	$\frac{433.500.924}{433.500.924} = 100 \%$	$\frac{295.199.649}{295.199.649} = 100 \%$

Jika menganalisa Rasio Rasio Kualitas Aktiva Produktif maka posisi Desember 2025 terjadi perbaikan sebesar 0.13 % dengan kualitas aktiva produktif pada posisi yang sama di tahun lalu yang disebabkan adanya perbaikan kualitas kredit yang diberikan yang disebabkan adanya penyelesaian kredit kredit bermasalah.

Rincian pemberian kredit menurut kolektibilitas posisi Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Kolektibilitas	Baki Debet	Rasio
Lancar	Rp. 37.386.837.688	90.60 %
Dalam Perhatian Khusus	Rp. 2.886.608.056	7.00 %
Kurang Lancar	Rp. 232.005.187	0.56 %
Diragukan	Rp. 314.210.867	0.76 %
Macet	Rp. 447.096.383	1.08 %
Jumlah	Rp. 41.266.758.616	100.00 %

Jika melihat dari rasio-rasio diatas maka rasion kredit NPL adalah sebesar 2.41 gross dan 1.48% netto

Jumlah Perbandingan Kredit bermasalah terhadap total kredit adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} = \frac{993.312.892}{41.266.758.616} = 2.41\%$$

Sebagian besar dari kredit bermasalah disebabkan terjadinya kegagalan usaha, seperti gagal panaan, menurunnya daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat.

- **Rentabilitas**

	Des'25	Des'24
1. <u>Labasebelum pjK</u> Rata-rata Asset	= $\frac{5.487.005.887}{47.365.006.898} = 11.65\%$	= $\frac{2.123.249.000}{43.168.3021.000} = 4.92\%$

Kemampuan perusahaan dalam menghimpun laba mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan rasio perolehan laba tahun lalu dengan kenaikan sebesar sebesar 6.73% sebagai akibat dari terjadinya perubahan SAKEP perhitungan bunga di hitung ulang dari Flat To EIR secara Annuitas.

	Des'25	Des'24
2. <u>By Operasional</u> Pend Operasional	= $\frac{10.716.859.145}{16.282.4046.864} = 65.82\%$	= $\frac{8.945.052.918}{11.062.413.732} = 80,09\%$

Jika menganalisa Rasio Efisiensi ini kondisi perusahaan relatif sama mengalami penurunan sebesar 14.277% dari posisi sama di tahun lalu dengan demikian manajemen telah berhasil melakukan efisiensi dan efektifitas.

- **Likuiditas**

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari perkembangan rasio likuiditas sebagai berikut :

	Des'25	Des'24
1. <u>Alat Likuid</u> Hutang Lanca	= $\frac{8.437097.862}{30.930.452.240} = 27.28\%$	= $\frac{7.240.497.000}{28.642.237.000} = 25.28\%$

Pada posisi yang sama di tahun yang berbeda, untuk penyediaan alat likuid rasionya masih diatas 10% cukup aman sebagai cadangan likuiditas, sehingga dana-dana yang ada masih banyak yang belum diproduktifkan namun jika dibandingkan rasio Likuiditas posisi Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 2%, tingginya alat likuid ini disebabkan sebagai antisipasi penarikan pada awal tahun pada periode idul fitri dan tahun baru.

	Des'25	Des'24
2. <u>Aktiva Produktif</u> Dana Pihak Ke 3	= $\frac{41.266758.616}{30.985392.951} = 133.57\%$	= $\frac{28.597.996}{36.791.059.977} = 128.64\%$

Rasio LDR menunjukkan meningkat sebesar 6.93 % dari posisi Desember tahun 2024, perhitungan LDR ini tidak memasukan komponen simpanan bank lainnya dan pinjaman yang diterima sesuai dengan ketentuan tentang Manajemen risiko, bila di masukan komponen dana pinjaman antar bank dan simpanan antar bank maka rasio LDR adalah sebesar 92.85%.

PROFIL RISIKO DAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT HAYURA ARTALOLA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SE OJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Profile Risiko						
Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi Desember 2025			Penilaian Posisi Sebelumnya Juni 2025		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manaemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	3	3	3
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Strategi	-	-	-	-	-	-
Risiko Reputasi	-	-	-	-	-	-
Peringkat Risiko			2			2

I. PROFIL RISIKO DAN FORMASI TATA KELOLA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PT BPR HAYURA ARTALOLA BANDUNG

Berdasar hasil analisis dan evaluasi tentang Profile Risiko dan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Hayura Artalola untuk selama semester ke II (Dua) tahun 2025 (Juli-Desember) sebagai berikut:

1. Profil Risiko PT BPR Hayura Artalola Kab.Bandung

A. Profil Risiko Kredit

Profile Risiko pengelolaan risiko kredit diperoleh peringkat **risiko 2 (Rendah)** dengan kondisi sama pada profil risiko periode laporan sebelumnya. Profil risiko ini menunjukkan bahwa BPR Hayura Artalola untuk selama semester II (Dua) 2025 (Juli-Desember) sebagai berikut:

a. Aktivitas bisnis yang dilakukan BPR antara lain:

- Pengelolaan Risiko Kredit, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari *risiko kredit inhern* nilai komposit 2 (dua) tergolong **Rendah** selama periode laporan, Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian pada parameter ratio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan 10.45% ada kenaikan sedikit dari periode sebelumnya 10.32%, masih diatas standar rata rata 7%, dimana perlu lebih meningkatkan kehati-hatian dalam tahapan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan kualitas kredit sesuai POJK No. 01 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor 1 tahun 2019 yaitu pada diatas ambang batas 7%, namun hal ini masih mampu dikendalikan dan tidak berdampak signifikan yang perlu perbaikan data atau pengendalian yang lebih baik.

Karakteristik BPR Hayura Artalola yang termasuk dalam tingkat Risiko Rendah antara lain:

- a) Portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah Ratio Aktiva Produktif terhadap total Aset rata rata 96,22%, Ratio KYD terhadap total Asset 85,84%, 25 debitur besar rata rata 15,40%, Ratio Kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit rata rata 53,71%
- b) Konsentrasi pemberian kredit yang tidak terlalu signifikan;
- c) Pemberian kredit memiliki kualitas kolektibilitas yang baik dengan NPL rata rata 2.28%, pada peride laporan dengan NPL Net rata rata 1.72%
- d) Strategi pemberian kredit secara umum relatif stabil; dan
- e) Portofolio pemberian kredit relatif sedikit terpengaruh oleh perubahan faktor eksternal, yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat serta perubahan pola konsumsi dari belanja langsung (offline) ke belanja daring (online). Kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap kualitas dan kinerja portofolio kredit, mengingat karakteristik debitur BPR yang sebagian besar bergerak pada sektor kebutuhan dasar dan usaha lokal yang masih memiliki permintaan relatif stabil. Selain itu, BPR telah melakukan penyesuaian kebijakan kredit dan pemantauan debitur secara berkala sebagai langkah mitigasi risiko atas perubahan tersebut.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit (KPMR) secara komposit **2 (Memadai)**.

Pada periode waktu tertentu KPMR BPR Hayura Artalola untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 5) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
- 6) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 7) Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.
- 11) Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki.

2. Formasi Penerapan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan tata kelola fungsi manajemen risiko kredit periode semester II (Dua) 2025 diperoleh ini komposit **2** dengan **Predikat Memadai**.

- a. Pada Pilar Pengawasan Direksi dan komisaris telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai ketentuan dengan nilai komposit 2 (dua) dengan predikat **Memadai**, hal yang perlu perbaikan adalah dalam hal melakukan komunikasi

- kepada seluruh jenjang organisasi terutama di tingkat bawah belum mampu sepenuhnya memahami manajemen risiko kredit yang diterapkan secara keseluruhan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan,
- b. Pada Pilar Kecukupan Kebijakan Prosedur dan limit risiko, BPR telah memiliki kebijakan dan limit risiko yang memadai sesuai kompleksitas bisnis BPR, namun masih terdapat ketidaksesuaian minor yang tidak signifikan yang perlu perbaikan dalam hal kecukupan sumber daya manusia dan BPR belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan limit risiko kredit dalam hal terjadi perubahan bisnis atau ketentuan perundang-undangan, namun tidak berdampak signifikan.
 - c. Pada pilar proses manajemen Risiko dan sistem Informasi manajemen risiko yang memadai, dilakukan secara konsisten didukung dengan sistem informasi manajemen yang cukup, hal yang perlu perbaikan adalah penyempurnaan sistem informasi manajemen, sehubungan dengan terjadinya perubahan regulasi mengenai sistem pelaporan BPR terbaru, yang dipandang memerlukan waktu penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan kebutuhan yang tepat waktu yang di dukung dengan informasi teknologi yang memadai.
 - d. Pada pilar sistem pengendalian intern secara menyeluruh, berdasarkan pertanyaan nomor 13 mengenai apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR, diperoleh nilai skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jenjang organisasi BPR, khususnya dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur manajemen risiko kredit.

Meskipun demikian, fungsi pengendalian telah berjalan dan koordinasi antar unit kerja telah dilakukan, serta PE Audit Internal telah melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, pelaksanaan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh jenjang organisasi, sehingga masih diperlukan penguatan internalisasi kebijakan dan peningkatan kepatuhan. Kondisi ini belum menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas aset maupun kinerja keuangan BPR, namun perlu menjadi perhatian manajemen untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan.

B. RISIKO OPERASIONAL

1. Tingkat Risiko Operasional : Peringkat 2 (Rendah)

Pada Periode laporan Profil Risiko Operasional BPR Hayura Artalola Peringkat (2) Rendah secara umum karakteristik BPR Hayura Artalola antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu dan pada masa yang akan datang.

- b) KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) tergolong Memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

2. Risiko Intern Operasional : Peringkat 2 (Rendah)

Pada periode tertentu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dengan karakteristik indikator secara umum dalam tingkat Risiko rendah antara lain:

- a) Bisnis BPR berkarakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;
- b) SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;
- c) Teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;
- d) Frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian tidak signifikan (nihil) dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan
- e) Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah dan tidak terlalu signifikan.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Peringkat 2 (Memadai)

KPMR untuk Risiko Operasional cukup memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Pada Periode Waktu Tertentu karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 5) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

- 6) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 7) Strategi Risiko Operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen operasional serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.
- 11) Proses operasional secara umum memadai mulai. Fungsi dual control pada proses operasional berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih yang dapat diperbaiki

C. RISIKO KEPATUHAN

1. Tingkat Risiko : Peringkat 2 (Rendah)

Pada Periode Laporan Profil Risiko Kepatuhan BPR Hayura Artalola Peringkat **(2) Rendah** secara umum BPR Hayura Artalola berkarakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- b) KPMR memadai dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen, namun telah dilakukan langkah perbaikan secara bertahap dan terukur.
- c) Kelemahan pada periode sebelumnya berupa temuan berulang telah ditindaklanjuti dan diperbaiki seluruhnya pada Semester 2 (dua), sehingga tidak terdapat lagi temuan berulang yang material. Perbaikan tersebut telah memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja maupun kondisi keuangan BPR.

2. Risiko Inheren : Peringkat 2 (Rendah)

Pada periode laporan, Risiko Inheren Kepatuhan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Inheren Kepatuhan **tergolong rendah (Peringkat 2)** selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari karakteristik indikator secara umum sebagai berikut:

- a) Rekam jejak kepatuhan BPR tergolong baik dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan;

- b) BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan, kebijakan internal, serta kode etik yang berlaku;
- c) Tidak terdapat proses litigasi pada BPR, atau apabila terdapat proses litigasi, frekuensi dan/atau dampak finansialnya tidak signifikan, tidak mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak material terhadap reputasi BPR;
- d) Perjanjian yang dibuat oleh BPR dinilai memadai dan telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Sebagian besar hingga seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Kelemahan pada periode sebelumnya berupa temuan berulang hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan seluruhnya pada Semester 2 (dua), sehingga tidak terdapat lagi temuan berulang yang material pada periode laporan dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan maupun reputasi BPR.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko : Peringkat 2 (Memadai)

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kepatuhan dinilai memadai, dimana penerapan manajemen risiko telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Kelemahan yang sebelumnya teridentifikasi bersifat minor dan telah ditindaklanjuti serta diselesaikan pada Semester 2 (dua) sehingga tidak mengganggu aktivitas bisnis normal BPR.

Pada periode waktu tertentu, karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai tercermin dari indikator sebagai berikut

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan tergolong kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh jenjang organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan berjalan efektif dan memadai, serta menunjukkan perbaikan berkelanjutan atas kelemahan minor yang sebelumnya teridentifikasi.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bersifat independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, dalam mendukung pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan.
- 6) Delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala, serta dilaksanakan secara konsisten.
- 7) Strategi Risiko Kepatuhan telah ditetapkan dengan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi Risiko Kepatuhan BPR.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen Kepatuhan serta penetapan limit Risiko Kepatuhan memadai, tersedia untuk seluruh area

Manajemen Risiko, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.

- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan.
- 11) Proses pelaksanaan kepatuhan secara umum berjalan dengan baik, termasuk penerapan fungsi *dual control* yang dilaksanakan secara independen.
- 12) Kelemahan pada periode sebelumnya berupa indikasi temuan berulang hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan seluruhnya pada Semester 2 (dua), sehingga tidak terdapat lagi temuan berulang yang material pada periode laporan dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan maupun reputasi BPR.

D. RISIKO LIKUIDITAS

1. Tingkat Risiko Likuiditas : Peringkat 2 (Rendah)

Pada Periode tertentu Profil Risiko likuiditas BPR Hayura Artalola Peringkat Rendah secara umum memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR mampu menutup kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu.
- b) KPMR memadai dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen, BPR mempunyai reputasi baik untuk memenuhi pendanaan menutup kewajiban jatuh tempo dengan segera baik dari pengaturan arus kas aset produktif maupun sumber pendanaan lainnya.

2. Risiko Inheren Likuiditas : Peringkat 2 (Rendah)

Pada periode laporan Risiko Inheren likuiditas dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Hayura Artalola, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Inheren likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dengan karakteristik indikator secara umum dalam tingkat Risiko rendah antara lain:

- a) Ratio alat likuiditas 13.97% terhadap total asset, Ratio alat likuid terhadap kewajiban lancar 19.59% sedikit diatas ambang batas risk toleran 20%, LDR 141.76%, 25 besar nasabah depositan dan tabungan sebesar 29,50%, ratio pendanaan non inti 21.97% dengan perhitungan tidak memasukan pinjaman antar bank sebagai sumber dana, BPR mampu menutup seluruh kewajiban jatuh tempo baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan krisis;

- b) Reputasi BPR baik sehingga memudahkan dalam penggalangan pendanaan antar bank dengan segera;
- c) BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;
- d) Tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;
- e) Perjanjian yang dibuat oleh BPR cukup memadai;
- f) Seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Peringkat 2 (Memadai)

KPMR untuk Risiko Likuiditas memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Pada periode waktu tertentu karakteristik BPR Hayura Artalola dengan KPMR Memadai dengan indikator antara lain:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko likuiditas.
- 2) Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- 3) Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
- 5) SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
- 6) Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
- 7) Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.
- 8) Kebijakan dan prosedur Manajemen likuiditas serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.
- 9) Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.
- 10) Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
- 11) Proses pelaksanaan likuiditas secara umum memadai mulai. Fungsi dual control pada proses kepatuhan berjalan secara cukup independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih yang dapat diperbaiki

E. TINGKAT KESEHATAN BPR

a. Permodalan (Capital)

Pada Periode Semester II (Juli - Desember 2025)

- 1) Ratio Modal dibanding ATMR (KPM) sebesar 34.42%
- 2) Ratio Modal inti Terhadap Asset Produktif Bermaslah (APB) ratio 1736.82%
- 3) BPR Hayura Artalola memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR. BPR Hayura Artalola termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi sebagian besar dari karakteristik sebagai berikut:
 - a) BPR memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR ke depan;
 - b) kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat cukup menyerap kerugian;
 - c) BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;
 - d) BPR memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR; dan/atau
 - e) BPR memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik dan memiliki keterbatasan dukungan permodalan dari pemegang saham
- 4) Penilaian Keseluruhan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Hayura Artalola Pada Periode Laporan adalah sebagai berikut:
 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR Hayura Artalola telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK.
 2. Hasil Tata Kelola Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.
 3. Berdasarkan hasil penilaian sendiri self assessment penerapan tata kelola Semester II (Dua) tahun 2025 diperoleh peringkat komposit 2.26 Predikat BAIK.

b. Earning

Pada Periode Semester II (Juli - Desember 2025) diukur secara selama periode pelaporan

- 1) Ratio ROA 11.59%
- 2) Ratio BOPO 65.82%
- 3) Ratio NIM 26.81%

- 4) BPR Hayura Artalola memiliki Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR Hayura termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi sebagian besar karakteristik sebagai berikut:
 1. kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;
 2. sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings sangat dominan.
 3. Core earnings mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPR; komponen yang mendukung core earnings stabil; dan/atau
 4. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
 - 5) Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum SEHAT sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercemin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- c. Penilaian sendiri (Self Assempen Penerapatan Tata Kelola Semester I (Satu) tahun 2025 dengan skala penilaian komposit **2.25** dengan peringkat kategori BAIK
- d. Profile risiko untuk 4 (empat) risiko yaitu Risiko Kredit, Operasional, kepatuhan dan Likuiditas memperoleh nilai komposit 2 tingkat risiko **RENDAH**, dengan kualitas penerapan manajemen risiko (2) **MEMADAI**

3. KESIMPULAN

1. Profil risiko **Kredit** pada semester II (Dua) tahun 2025 PT. BPR Hayura Artalola dengan laporan profile risiko pada peringkat risiko **2 (Rendah)**, yang masih perlu perbaikan yang bersifat minor pada risiko kredit inhern maupun pada kualitas penerapan manajemen risiko kredit.

Tingkat Risiko Inhern berpredikat **2 (Rendah)** dan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko Kredit diperoleh predikat **2 (Memadai)** namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan potensi peningkatan kredit kualitas Rendah yang cenderung naik dari periode laporan sebelumnya.

2. Profil Risiko **Operasional** peringkat **2 (Rendah)**

Tata Kelola Risiko Inhern dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional diperoleh predikat 2 (**Memadai**) namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. Pada periode laporan Semester 2, Profil Risiko Kepatuhan BPR Hayura Artalola berada pada **Peringkat 3 (Sedang)**. Penetapan peringkat tersebut

mencerminkan bahwa secara umum penerapan kepatuhan telah berjalan dengan baik dan stabil pada periode laporan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pada periode laporan Semester 2 tersebut, seluruh temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan pada periode sebelumnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sepenuhnya, sehingga tidak terdapat lagi temuan yang belum ditindaklanjuti secara material.

Adapun penilaian per komponen adalah sebagai berikut:

- **Risiko Inheren Kepatuhan** berada pada **Peringkat 2 (Rendah ke Sedang)**, sejalan dengan perbaikan proses kepatuhan dan menurunnya potensi risiko akibat peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- **Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kepatuhan** berada pada **Peringkat 2 (Memadai)**, mencerminkan bahwa sistem, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko kepatuhan telah diterapkan secara efektif dan konsisten.

Dengan telah diselesaikannya seluruh tindak lanjut rekomendasi, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan eksternal (OJK) maupun pengawasan dan audit internal, sistem pengendalian intern secara menyeluruh telah mengalami penguatan yang signifikan, sehingga mendukung penerapan tata kelola dan manajemen risiko kepatuhan yang lebih baik ke depan.

4. Profil Risiko **Likuiditas** peringkat **2 (Rendah)** yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah pemenuhan limit risiko secara konsisten diterapkan sesuai dengan karakteristik jatuh tempo sumber dana.

Tata Kelola Risiko Inheren berpredikat **2 (Rendah)** dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas diperoleh predikat **2 (Memadai)** namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh, khususnya pada akses kebutuhan likuiditas pada saat tertentu yang sedikit mempunyai keterbatasan.

5. Profil Risiko BPR Hayura Artalola termasuk dalam peringkat ini secara umum memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
 - b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
6. Penerapan Pelaksanaan tata kelola berdasarkan self assesment periode laporan memperoleh nilai komposit 2.26 dengan predikat BAIK

Tingkat Kesehatan BPR Pada Periode Semester II 2025 (Juli - Desember) berperingkat PK 2 (Sehat) dengan total Nilai 1.85

LAPORAN TINGKAT KESEHATAN BANK BPR HAYURA ARTALOLA					
NILAI KOMPOSIT:					
NO	PARAMETER	PENILAIAN POSISI LAPORAN			
		RASIO (%)	SKALA (A)	BOBOT (B)	NILAI FAKTOR (C)=(A)*(B)
1	CAPITAL		1	30.00	0.30
2	{1} Modal/ATMR	34.42%	1		
3	{2} Modal Inti/Aset Prod. Bermasalah	1736.82%	1		
4	EARNINGS		1	15.00	0.15
5	ROA	11.59%	1		
6	BOPO	65.82%	1		
7	NIM	26.81%	1		
8	TATA KELOLA		3	30.00	0.90
9	PROFIL RISIKO		2	25.00	0.50
10	Total Nilai				1.85
11	Peringkat TKS				2
					Sehat

No		Penjelasan
1	Kesimpulan Tingkat Kesehatan	<p>Mencerminkan kondisi BPR yang secara umum SEHAT, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal tersebut tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum berada pada kondisi baik. Dalam hal terdapat kelemahan internal maupun eksternal, secara umum kelemahan tersebut tidak bersifat signifikan dan tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha BPR.</p> <p>Pada periode laporan Semester 2, khususnya dalam penerapan tata kelola, seluruh temuan hasil pemeriksaan rutin yang sebelumnya teridentifikasi telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sepenuhnya, sehingga tidak terdapat lagi temuan berulang yang belum ditindaklanjuti pada periode laporan. Perbaikan tersebut telah memperkuat penerapan tata kelola dan sistem pengendalian intern BPR secara berkelanjutan</p>
2	Profil Risiko	<p>Profil Risiko BPR Hayura Artalola termasuk berisiko rendah untuk risiko inern kredit, risiko inern operasional dan likuiditas namun untuk risiko inern kepatuhan termasuk kategori sedang pada periode laporan dan kalitas penerapan manajemen risiko tergolong memadai, kecuali untuk kepatuhan cukup memadai, secara keseluruhan tingkat risiko rendah, BPR Hayura Artalola pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b) KPMR Memadai. dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3	Tata Kelola	<p>Penerapan Penerapan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Semester II (Dua) Tahun 2025 Di BPR Hayura Artalola</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Secara Struktur Dan Infrastruktur Telah Memadai Sesuai Ketentuan Dan Peraturan OJK b) Proses tata kelola berjalan cukup efektif meskipun masih ada kelemahan tercermin dari temuan pemeriksaan OJK masih terdapat temuan periode sebelumnya yang belum sepenuhnya di tindaklanjuti pada periode laporan dan pemeriksian intern namun tidak berdampak terhadap keuangan BPR dan non keuangan BPR c) Hasil Tata Kelola, berdasarkan self assessment penerapan tata kelola Semester II Tahun 2025, diperoleh nilai komposit 2,26 dengan Predikat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola BPR telah berjalan secara efektif dan memadai. d) Adapun faktor-faktor yang memerlukan penyempurnaan dan perbaikan dengan skala kecil hingga sedang berasal dari temuan pada periode Semester I Tahun 2025. Seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sepenuhnya pada Semester II Tahun 2025, sehingga pada periode

		laporan tidak terdapat lagi temuan yang belum ditindaklanjuti secara material. Kondisi ini mencerminkan komitmen manajemen dalam memperkuat penerapan tata kelola secara berkelanjutan
4	Rentabilitas	Rentabilitas Sangat Memadai, Laba Melebihi Target, Dan Mendukung Pertumbuhan Permodalan. BPR Hayura Artalola Yang Termasuk Dalam Peringkat 1 Memenuhi Sebagian Besar Dari karakteristik Sebagai Berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba rentabilitas sangat memadai; b. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings sangat dominan. Core earnings mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPR; c. Komponen yang mendukung core earnings sangat stabil; dan/atau d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.
5	Permodalan	BPR secara kuantitatif memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR. BPR memenuhi sebagian besar karakteristik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. BPR secara kuantitatif memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR Ke Depan; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. BPR memiliki manajemen permodalan yang cukup baik memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala bpr e. Namun BPR memiliki keterbatasan terhadap permodalan permodalan dari pemegang saham, dimana modal hanya dibentuk dari pertumbuhan laba organik.

4. KESIMPULAN

1. Profil risiko **Kredit** pada semester II (Dua) tahun 2025 PT. BPR Hayura Artalola dengan laporan profile risiko pada peringkat risiko **2 (Rendah)**, yang masih perlu perbaikan yang bersifat minor pada risiko kredit inhern maupun pada kualitas penerapan manajemen risiko kredit.

Tingkat Risiko Inhern berpredikat **2 (Rendah)** dan Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko Kredit diperoleh predikat **2 (Memadai)**

namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Profil Risiko **Operasional** peringkat **2 (Rendah)**

Tata Kelola Risiko Intern dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional diperoleh predikat 2 (**Memadai**) namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. Profil Risiko **Kepatuhan** peringkat **2 (Rendah)** yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah penyesuaian atau update peraturan peraturan intern sesuai dengan ketentuan terkini.

Tata Kelola Risiko Intern berpredikat **2 (Rendah)** dan Penerapan Manajemen Risiko kepatuhan diperoleh predikat 2 (**Memadai**) namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh

4. Profil Risiko **Likuiditas** peringkat **2 (Rendah)** yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah pemenuhuan limit risiko secara konsisten diterapkan sesuai dengan karakteristik jatuh tempo sumber dana.

Tata Kelola Risiko Intern berpredikat 2 (Rendah) dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas diperoleh predikat 2 (**Memadai**) namun masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya pada dimensi sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5. Profil Risiko BPR Hayura Artalola termasuk dalam peringkat ini secara umum sebagai berikut:

- c. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- d. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

6. Tingkat Kesehatan BPR Pada Perode Semester II 2025 (Juli-Desember) berperingkat PK 2 (Sehat) dengan total Nilai 1.85

Demikian laporan profil risiko dan Tingkat Kesehatan BPR Semester II (Dua) 2025 disampaikan, dan untuk mengetahui secara rinci bahasan tampak pada lampiran surat ini.

Dari resiko-resiko tersebut diatas bisa kita kendalikan apabila penerapan Mangemen Resiko bisa dikelola dengan baik yakni dengan pengawas yang lebih memadai baik internal maupun external dijalankan dengan baik yakni dengan membuat suatu standar operasioanl dan selalu melakukan pengkinian atas SOP sesuai dengan ketentuan pada setiap bagian sehingga tugas dan tanggung jawab menjadi jelas, penerapan atas SOP berjalan dengan baik , pemantauan pelaksanaan yang berkesinambungan dan evaluasi yang dilakukan sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi bisa di deteksi sedini mungkin, dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan jika diperoleh penyimpangan.

Dalam Rangka menerapkan fungsi kepatuhan BPR telah menunjuk salah satu anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah mengangkat pejabat eksekutif dalam jabatannya sebagai kepala bagian kepatuhan dan manajemen resiko.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan komisaris dijalankan sesuai ketentuan.

Untuk pengendalian resiko operasional BPR menunjuk atau menetapkan Internal Control yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan secara berkala dan pelaksanaan penerapan manajemen resiko.

Dalam rangka pengendalian resiko kredit BPR membuat suatu system operasional prosedur perkreditan juga membentuk tim khusus penanganan kredit bermasalah sehingga apabila terjadi permasalahan bisa dengan secepatnya diselesaikan.

PENGELOLAAN BPR DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Dalam rangka menjalankan kegiatan operasional sehingga target-target yang telah ditetapkan perusahaan tercapai maka dibuatkan struktur organisasi yang memadai dan penempatan personil sesuai dengan bidang pekerjaannya, Struktur Organisasi terlampir.
- Dalam rangka pemenuhan kewajiban Modal Inti Minimum BPR telah memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum pada tahun 2023 sebesar minimal 6 Milyar.

Modal Inti Minimum posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp.10.579.412.470,-

- Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary BPR berusaha menjalankan fungsinya dengan kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit.
- Tahun 2025, BPR telah berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi yakni dengan penambahan peningkatan program di sistem Core Banking BPR juga telah berkerjasama dengan Faspay untuk proses pelayanan penyetoran melalui Virtual Account secara real time masuk ke rekening nasabah.
- Selain itu, agar dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap nasabah dalamantisipasi situasi kondisi bencana yang tak terduga, BPR telah bekerjasama dengan vendor PT. Sinergi Prakarsa Utama perihal *Disaster Recovery Center*. Kapasitas ruang DRC tersebut berada di luar wilayah kerja BPR lengkap dengan sarana pendukung, pengembangan system percepatan proses pelayanan M-Collection serta kerjasama Faspay layanan Virtual Account yang bisa diakses dari berbagai bank umum, Alfa Mart, Indomart dan lainnya secara real time, percepatan proses perkreditan melalui LOS (Loan Origination System), Aplikasi Traker untuk marketing, Aplikasi Dask Board untuk Approval
- Perkembangan perusahaan yang terus menunjukkan perbaikan, dikarenakan BPR melakukan pendekatan yang persuasif kepada sumber-sumber informasi

yang bisa dijadikan sarana promosi, dengan target market hampir 80 % kepada para pengusaha mikro yang berada diwilayah jaringan kantor BPR.

- Jaringan wilayah kerja disamping kantor pusat BPR mempunyai 2 (kantor) kantor kas yang berada di Soreang yang mencakup 4 (empat) wilayah operasional yang terdiri dari 8 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Soreang, Banjaran, Pamengpeuk, Katapang, Kutawaringin, Lembang, Sindangkerta dan Kecamatan Naringgul.
- Kerjasama yang terus dijalin antara BPR dengan bank lain diantaranya dengan Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya maupun BPR- BPR lain sebagai alternatif sumber dana yang produktif dan terukur , disamping sumber dana dari pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito.
- Kerjasama dengan lembaga lainnya yakni PT Komunal dalam proses pemasaran Deposito secara Digital dengan menggunakan Platform Komunal sebagai agen pemsarannya.
- Komposisi SDM tahun 2025 dengan proporsi terbesar dengan tingkat pendidikan SLTA (63%) sedangkan proporsi terkecil adalah karyawan dengan tingkat pendidikan S1 (14%). Uraian lebih lanjut, termasuk perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu, adalah sebagai berikut:

Pendidikan	Desember 2025		Desember 2024	
S1	9	20%	10	14%
D3	6	14%	7	23%
SLTA Plus	29	66%	26	63%
Keseluruhan	43	100.00%	43	100.00%

- Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam upaya meningkatkan skill dan kemampuan para karyawanya di tahun 2025 telah diikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Perbarindo maupun In house Training.
- Tahun 2025 melakukan pencadangan Dana Pendidikan sebesar Rp. 3% dari BTK tahun lalu, realisasi Pendidikan dan pelatihan tetap dilakukan dimana dengan Beban Pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 156.339.- ribu

Jenis pelatihan dan jenis pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Program Sosialisasi Dan Pelatihan	Pihak Pelaksana	Penyelenggara	Bagian	Tanggal Pelaksanaan
1	Penerapan Kebijakan dan Pengkinian pedoman Tata Kelola BPR	Internal BPR	BPR Hayura	Seluruh Pegawai	31 Januari 2025
2	Sosialisasi Tentang Pengkinian Pedoman Kebijakan Tata Kelola BPR	Eksternal BPR	PERBARINDO	PKMR dan Direksi	23 Januari 2025
3	Sosialisasi Ketentuan Panduan Akutansi Perbankan	Eksternal BPR	PERBARINDO	Direksi	30 Januari 2025
4	Bimbingan teknologi tentang perpajakan	Eksternal BPR	Perpajakan	Bagian Akutansi dan Kabag Operasional	30 Januari 2025
5	Pelatihan Sertifikasi SDM berbasis kompetensi	Eksternal BPR	PERBARINDO	Direksi	12 Februari 2025
6	sosialisasi dan Implementasi CKPN di corebank ARB Sesi 1	Internal BPR	BPR Hayura	Seluruh Pegawai	24 April 2025
7	sosialisasi dan Implementasi CKPN di corebank ARB Sesi 2	Internal BPR	BPR Hayura	Seluruh Pegawai	02 Mei 2025
8	Pelatihan Implementasi SAK EP	Eksternal BPR	VENDOR ARB(CBS)	Direksi dan Kabag Operasional	22 April 2025
9	Sosialisasi tentang Whistle Blowing Sistem (Strategi anti Fraud)	Internal BPR	BPR Hayura	Seluruh Pegawai	28 Mei 2025
10	Sosialisasi tentang Kode etik kepatuhan perusahaan	Internal BPR	BPR Hayura	Seluruh Pegawai	30 Juni 2025
11	Seminar dari LPS tentang pencegahan Bank Gagal/ Seminar ERM Practice Sharing	Eksternal BPR	LPS	PKMR	26 Juni 2025
12	Seminar tentang Complain Handling	Eksternal BPR	OJK	Kabag Operasional	26 Juni 2025
13	Pelatihan Mengenai Audit Internal	Eksternal BPR	PERBARINDO	Audit internal	24/07/2025
14	Pemasaran (Marketing)	Eksternal BPR	PT KALPATA MANDIRI KONSULTAMA	Marketing kredit	18/09/2025
15	Skill Leadership	Eksternal BPR	PERBARINDO	Kepala bagian operasional, supervisi dan kepala bagian sdm	23/09/2025

16	Service Excelent	Eksternal BPR	PT KALPATA MANDIRI KONSULTAMA	Teller dan cs	09/10/2025
17	Perpajakan	Eksternal BPR	KPP PRATAMA SOREANG	Bagian akunting dan direksi	16/10/2025
18	Governansi Insight Forum	Eksternal BPR	OJK	direksi	13/10/2025
19	Aplikasi Digital Sirenbis	Eksternal BPR	PERBARINDO	direksi	12/11/2025
20	Sosialisasi Transaksi Mencurigakan (Apu,Ppt,Pppspm)	Internal BPR	BPR HAYURA ARTALOLA	Semua karyawan	31/07/2025
21	Sosialisasi Pencegahan Dan Penerapan Program Apu,Ppt, Dan Pppspm	Internal BPR	MAHFUD FAUZI	Semua karyawan	04/09/2025
22	Sosialisasi Kode Etik Karyawan	Internal BPR	BPR Hayura Artalola	Semua karyawan	30/09/2025
23	Penerapan Management Risiko	Internal BPR	BPR Hayura Artalola	Semua karyawan	31/10/2025
24	Perlindungan Konsumen	nternal BPR	BPR Hayura Artalola	Semua karyawan	28/11/2025

- Penyempurnaan Standar Operasional Prosedure (SOP) Kredit, Kepegawaian dan Operasional Umum dan pelaksanaan serta pengawasan secara berkesinambungan atas penerapan SOP sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik.
- Penerapan atas pelaksanaan sosialisasi ketentuan dilakukan pada SIM portal atau Forum BPR Hayura, pelaksanaan sosialisasi ketentuan sebagai upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan serta permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada Mangement BPR untuk memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan internal risk culture dan risk awarness sebagai salah satu strategi penguatan fungsi manajemen risiko dan internal control, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedure.
- Jumlah gaji , honor dan fasilitas lain yang dibayarkan kepada Direksi, Komisaris dan karyawan pihak-pihak lainnya adalah sebesar Rp. 5.112.526,- ribu pada tahun 2025 dan Rp. 5.013.564.382,- ribu pada tahun 2024.
- Kebijakan pemberian gaji, bonus kepada Direksi sepenuhnya dilakukan oleh RUPS sedangkan pemberian fasilitas lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) disetujui pada saat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan jumlah THR yang disetujui maksimum sebanyak 2 (dua) kali gaji.

Analisa Produktifitas dan Keterjangkauan

Produktivitas karyawan baik terhadap penggalangan dana maupun pengelolaan kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{SDM}} = \frac{30.423.914 \text{ rb}}{44 \text{ Orang}} = \text{Rp. } 691.452.590 \text{ ribu / orang}$$

Setiap karyawan mampu menghimpun dana tabungan dan deposito rata-rata sebesar Rp. 691.452 ribu.

$$\frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{SDM}} = \frac{41.266.758,- \text{ rb}}{44 \text{ Orang}} = 937.880.863$$

Setiap karyawan mampu mengelola kredit rata-rata sebesar Rp. = 937.880.046 ribu
Untuk mengetahui keterjangkauan Sumber Daya Manusia dalam mengelola nasabah baik dana maupun kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyimpan}}{\text{SDM}} = \frac{8.960 \text{ Orang}}{44 \text{ Orang}}$$

Tiap orang karyawan menangani 204 orang penyimpan .

$$\frac{\text{Jumlah Debitur}}{\text{SDM}} = \frac{2.485 \text{ Orang}}{44 \text{ Orang}}$$

Tiap 1 (satu) orang karyawan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur rata-rata sebanyak 57 orang.

Jika kita analisa rasio-rasio tersebut diatas dengan SDM sebanyak 43 orang BPR mampu mencapai tingkat perkembangan yang cukup baik, namun dengan semakin bertambahnya jumlah penyimpan maupun peminjam juga seiring dengan bertambahnya volume usaha yang senantiasa memerlukan pengawasan maka perusahaan terus melakukan rekrutment pegawai sesuai dengan kebutuhan.

**PENILAIAN ASPEK ASPEK TATA KELOLA
DI BPR HAYURA ARTALOLA
SEMESTER II TAHUN 2025**

I. ASPEK PEMEGANG SAHAM			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan perundang-undangan
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputus melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	2	Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan diatasnya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisari	2	Para pemegang saham belum sepenuhnya melakukan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR dan kebijakan strategis lainnya kepada Direksi dan Dewan komisaris
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	2	Pemegang saham cukup melakukan pemantauan terhadap sebagian besar perkembangan BPR melalui hasil pengawasan komisaris, sebagaimana tertuang dalam laporan Dekom secara berkala melalui RUPS sesuai ketentuan
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	3	Pemegang saham cukup melakukan dukungan perkembangan BPR rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar cukup terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pemegang saham cukup memastikan penerapan tata kelola yang sehat, dengan senantiasa meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, intervensi dan melakukan keputusan melalui RUPS tentang pengangkatan, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	2	Sebagian besar pengambilan keputusan yang diambil melalui RUPS senantiasa memperhatikan masukan, rekomendasi dari pemegang saham dan dewan komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	2	Setiap Pemegang saham selalu diperlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.

9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	2	Kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	2	Pembagian dividen dilakukan telah sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kesimpulan Faktor Pemegang Saham:			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dalam struktur penerapan tata kelola
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak terlalu signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Faktor Negatif	Terdapat keterbatasan terhadap akses permodalan, dan pemenuhan kewajiban apabila secara darurat diperlukan dana tambahan dari pemegang saham
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Sebagian besar proses pelaksanaan tata kelola telah berjalan memadai sehingga potensi benturan kepentingan dapat dikelola dengan baik, intervensi dari pemegang saham tidak signifikan, tidak terdapat pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, serta keputusan terkait pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Faktor Negatif	Pada periode sebelumnya terdapat temuan pemeriksaan OJK yang berulang terkait aspek tata kelola. Namun demikian, pada periode pelaporan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi OJK, sehingga tidak terdapat temuan signifikan yang masih outstanding dan tidak berdampak material terhadap hasil penerapan tata kelola oleh pemegang saham

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	2	Jumlah anggota Direksi BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur Operasional, dengan salah satu anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan. 1. Teulis Ratna Komala, Direktur Utama 2. Usep Subhan, Dir.Operasiona, Yang Membawahi fungsi Kepatuhan
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal yang sama dengan wilayah kantor pusat BPR yaitu di Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan 1. Teulis Ratna Komala, beralamat di KP. Ciwidey Kulon RT 01/13 Desa Ciwidey Kab. Bandung 2. Usep Subhan, beralamat di Kmp Sukarasa Permai Blok B 46 RT 01/ 18 Desa Tenjolaya Kec.Pasirjambu Kab. Bandung
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota direksi tidak sedang merangkap jabatan pada bank lain, LJK, perusahaan dan atau lembaga lainnya sesuai ketentuan OJK
4.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam surat rekomendasi hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Direksi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	2	Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi (Piagam Direksi) sesuai POJK.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	2	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	2	Direksi memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	2	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	3	Direksi telah meningkatkan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang tercermin dari penyelesaian seluruh temuan pada periode sebelumnya. Pada periode laporan, seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, sehingga penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dinilai semakin optimal dan berkelanjutan.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Pengambilan keputusan Direksi selalu berpedoman dan tata tertib kerja (Piagam Direksi) yang disusun dan ditetapkan Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	2	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat direksi selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan diputuskan dalam rapat Direksi.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2	Direksi cukup optimal membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non elektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR kepada seluruh pegawai melalui media elektronik dan non-elektronik yang mudah diakses.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	2	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR, serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	2	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	2	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman serta tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	2	Direksi selalu mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	3	Seluruh pegawai cukup mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR secara teknis operasional.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	2	Keputusan Direksi mengikat bagi semua direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	2	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	3	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPR.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK.

2. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun, Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik
		Faktor Negatif	Pada periode pelaporan tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dalam struktur dan infrastruktur tata kelola terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB) yang telah disusun telah dijadikan pedoman dan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan dan strategi BPR, serta didukung secara memadai oleh Direksi dalam rangka pencapaian target dan tujuan usaha BPR
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi RBB, pada kondisi tertentu masih terdapat ketidakkonsistenan dalam menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama apabila terjadi perubahan situasi dan kondisi internal maupun eksternal BPR, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan dan strategi usaha..
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya telah melaksanakan fungsi pengelolaan BPR dengan baik, termasuk melakukan tindak lanjut atas seluruh temuan audit atau pemeriksaan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Secara umum, kinerja perusahaan sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan RBB yang ditetapkan
		Faktor Negatif	Masih terdapat temuan-temuan yang bersifat administratif yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan, serta perlunya evaluasi secara berkala atas independensi Direksi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya guna memastikan penerapan tata kelola yang semakin efektif.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
2.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Wilayah tempat tinggal anggota salah satu Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
3.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK.
4.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
5.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
6.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	3	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK. Namun demikian, terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, yaitu antara H. Mutiq Yusmita Hadyat dan pemegang saham Hj. Gusti Nurmahrita dengan hubungan sebagai anak dan ibu
7.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
8.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau keputusan RUPS.	3	Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	3	Dewan Komisaris dinilai cukup optimal dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris cukup memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	2	Dewan Komisaris terkadang meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	3	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara cukup konsisten.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu min 3 hari dalam setiap minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris cukup menghindari terjadinya benturan kepentingan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain, serta tidak menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan dan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	3	Anggota Dewan Komisaris cukup melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi yang didahului oleh usulan pembentukan komite yang membantu Dewan Komisaris, karena posisi modal inti BPR berada di bawah Rp50 miliar sehingga BPR tidak diwajibkan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	2	Sehubungan dengan modal inti BPR yang berada di bawah Rp50 miliar, BPR tidak diwajibkan membentuk komite yang membantu Dewan Komisaris. Dengan demikian, Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, dan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	2	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	2	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran.

25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan khusus bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

3. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Faktor Negatif	Salah satu anggota dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, namun tidak berdampak signifikan pengaruhnya terhadap setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
		Faktor Negatif	Potensi akan terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui RUPS,
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realisasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membentuk Komite Direksi, seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M.
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit (Piagam Komite Kredit)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	2	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko karena posisi modal inti BPR berada di bawah Rp 50 miliar sesuai ketentuan POJK. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko yang ditunjuk, termasuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit karena posisi modal inti BPR berada di bawah Rp50 miliar sesuai ketentuan POJK. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh Komite Audit dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Meskipun BPR tidak membentuk komite karena modal inti di bawah Rp50 miliar, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan tetap berjalan efektif melalui pejabat eksekutif dan mekanisme internal sesuai ketentuan

8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	2	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	2	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	2	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk , sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	2	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak membentuk.

4. Kesimpulan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, sehingga belum ada outcome
		Faktor Negatif	BPR tidak wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	2	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	2	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai senantiasa menghindari diri dari segala bentuk/potensi benturan kepentingan yang didukung dengan fakta integritas dari semua pihak terkait.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	2	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi benturan kepentingan

5. Kesimpulan Penanganan Benturan Kepentingan			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR telah memiliki dan mengingkan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
		Faktor Negatif	pedoman dan kebijakan perlu dilakukan evaluasi secara berkala seperti ketentuan mengenai penunjukan penanggung jawab penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja dan seluruh aspek bisnis telah dilakukan dengan cukup baik
		Faktor Negatif	Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya dilaksanakan di setiap unit kerja dan level jabatan secara konsisten
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil penerapan dan penanganan benturan kepenting berhasil cukup baik, tidak terjadinya benturan kepentingn yang signifikan yang dapat mempengaruhi laba dan berdampak terhadap kerugian BPR
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap penanganan benturan di setiap unit kerja

6. Penerapan Fungsi kepatuhan			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan telah sesuai POJK.
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	3	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunankebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengan visi dan misi BPR, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan, telah cukup memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha BPR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.

6. Kesimpulan Penerapan Fungsi kepatuhan			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Struktur fungsi kepatuhan telah didukung oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang memadai
		Faktor Negatif	Pada periode sebelumnya terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan tata kelola BPR yang tercermin dari temuan pemeriksaan rutin OJK dengan indikasi berulang. Namun demikian, pada periode pelaporan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan rekomendasi OJK, sehingga tidak terdapat temuan signifikan yang masih outstanding.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah didukung secara efektif oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, sehingga penerapan prinsip tata kelola dan kepatuhan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman internal, serta tata tertib kerja yang berlaku.
		Faktor Negatif	Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam penguatan budaya kepatuhan dan konsistensi penerapan pengendalian kepatuhan pada seluruh unit kerja, khususnya dalam aspek pemantauan dan pelaporan secara berkelanjutan.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil penerapan fungsi kepatuhan menunjukkan bahwa kegiatan usaha BPR telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman internal, dan tata tertib kerja. Evaluasi kepatuhan telah dilakukan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan BPR
		Faktor Negatif	Hasil penerapan fungsi kepatuhan masih memerlukan peningkatan untuk memastikan konsistensi kepatuhan pada seluruh aspek kegiatan usaha BPR, meskipun secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Intern			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai POJK.
2.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR telah menunjuk PE audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern yang disertai memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit) sesuai ketentuan OJK.
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	3	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional.
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	3	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	3	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan BPR modal inti di bawah Rp 50 M.
8	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah diilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.

11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.
----	---	---	---

7. Kesimpulan Penerapan Fungsi Audit Intern			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi audit intern telah didukung oleh struktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya
		Faktor Negatif	Pada periode pelaporan tidak terdapat faktor negatif yang signifikan terkait struktur dan infrastruktur pelaksanaan fungsi audit intern.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern telah berjalan dengan baik. Hasil kerja audit intern dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama, serta penyampaian laporan audit telah dilakukan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Faktor Negatif	Ruang lingkup pemeriksaan audit intern masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh objek pemeriksaan berisiko tinggi dapat tercakup secara optimal.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil kinerja fungsi audit intern telah dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dengan baik. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) mencerminkan sebagian besar objek audit, temuan audit pada umumnya dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal, serta tidak terdapat temuan signifikan yang berdampak material terhadap risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, maupun risiko kepatuhan
		Faktor Negatif	Cakupan hasil pemeriksaan audit intern masih perlu ditingkatkan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh atas potensi risiko pada seluruh unit kerja sebagai bahan perbaikan dan penguatan pengendalian internal di periode berikutnya.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktif	Keterangan
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	pelaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukan BPR secara tepat waktu sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	2	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah cukup baik.

8. Kesimpulan Penerapan Fungsi Audit Ekstern			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dalam struktur pelaksanaan penugasan audit eksternal
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses audit eksternal telah sesuai dengan cakupan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK.
		Faktor Negatif	Dalam proses pelaksanaan audit eksternal, baru tercermin sebagian kecil permasalahan yang di hadapi BPR
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil audit Akuntan Publik (KAP) dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari hasil pemeriksaan KAP pada periode pemeriksaan untuk perbaikan kedepannya

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan modal, BPR tidak wajib membentuk Komite dan Satuan Kerja, pelaksana fungsi komite dan satuan kerja dilaksanakan oleh Pejabat eksekutif, yaitu Sdr. Selfi Setiawati,S.Kom
2.	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, sesuai dengan ketentuan terbaru, melakukan penetapan limit risiko risk toleran dan risk appetite
3.	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	BPR telah memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab, terhadap fungsi manajemen resiko, fungsi anti fraud, penerapan program APU dan PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
5	Direksi: a) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c) melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d) memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko, melakukan evaluasi, mmenerapkan batas limit BWK atas persetujuan transaksi di setiap level. melalukukan kebijakan terhadap manajemen resiko dengan baik. Dan memastikan penerapan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan anti fraud dan program APU PPT

6	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d) melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e) memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	3	<p>Dewan Komisaris menyetujui terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko, serta melakukan evaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, melakukan pengawasan secara cukup aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7	<p>BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	3	<p>BPR telah melakukan sebagian besar atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan cukup baik</p>
8	<p>BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	3	<p>sebagian besar dalam melaksanakan tugas, BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan cukup baik.</p>
9	<p>BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	<p>BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik.</p>
10	<p>BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	<p>BPR menerapkan strategi anti fraud secara cukup efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik</p>
11	<p>BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</p>	3	<p>BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan cukup baik.</p>
12	<p>BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	<p>BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik</p>
13	<p>BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan datadan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.</p>	2	<p>BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yan cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh.</p>
14	<p>Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.</p>	3	<p>Direksi telah melakukan dengan cukup baik dalam pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR secara umum telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan tidak terdapat produk atau aktifitas baru yang dilaporkan kepada OJK.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	3	BPR telah menyusun dan akan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin sesuai ketentuan serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

9. Kesimpulan Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR Hayura Artalola telah memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik.
		Faktor Negatif	Sebagai tindak lanjut atas perubahan struktur organisasi pada periode sebelumnya, masih diperlukan penguatan secara berkelanjutan terhadap peningkatan kompetensi dan pemahaman Pejabat Eksekutif dalam penerapan manajemen risiko, khususnya untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha BPR.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan strategi anti fraud berjalan baik sesuai dengan sifat dan kondisi pemilik risiko dapat diidentifikasi dan di mitigasi secara baik.
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud pelaksanaannya kadang kurang konsisten pada tahapan mitigasi dan pemantauan, baik pada manajemen risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Pada periode laporan Semester II, secara umum profil risiko kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas BPR tetap tergolong rendah, dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai dan konsisten. Struktur pengendalian internal telah berjalan lebih efektif, pengawasan manajemen telah kembali optimal, dan tidak terdapat kejadian fraud selama periode pelaporan.
		Faktor Negatif	Meskipun kondisi manajemen dan pengendalian internal telah kembali stabil, masih diperlukan penguatan berkelanjutan dalam pengendalian risiko operasional, khususnya pada aspek pencegahan dan pemantauan potensi terjadinya fraud, melalui peningkatan pengawasan melekat, evaluasi berkala, serta penguatan budaya kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh unit kerja.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar, telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kesimpulan Penerapan BMPK			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan mengizinkan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR
		Faktor Negatif	Pedoman dan kebijakan ketentuan BMPK yang di buat BPR belum sepenuhnya mengatur dan memperhatikan profile debitur khususnya yang masuk dalam pihak terkait, terutama kriteria pengecualian dari ketentuan BMPK
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit.
		Faktor Negatif	Dalam proses pemberian kredit meskipun sudah memperhatikan ketentuan BMPK, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengukur profile debitur khususnya debitur debitur besar, seperti memperhatikan kemampuan bayar, dan sumber pembayaran, termasuk pada pihak terkait
	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, pelaporan BMPK dilaksanakan sesuai ketentuan
		Faktor Negatif	Masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama terhadap pinjaman pinjaman besar dan pihak terkait yang perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan

11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	2	BPR sebagian besar sudah memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	3	BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola(P)			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	2	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah cukup baik menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah baik dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sebagian besar, BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja	3	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, didukung oleh proses pencatatan dan pelaporan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama periode pelaporan tidak terdapat indikasi window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN, maupun pencatatan yang menyimpang secara sengaja, serta telah melalui proses pengendalian internal dan pengawasan yang memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	2	Secara keseluruhan BPR tidak terdapat penyalahgunaan, pemanfaatan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR dan atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	Pada periode laporan tidak terdapat pengaduan konsumen yang signifikan, penanganan pengaduan ditangani secara memadai, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilaporkan secara tepat waktu.

11. Kesimpulan Penerapan Integritas Pelaporan

1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang cukup kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
---	--	----------------	---

		Faktor Negatif	Dalam proses penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pelaporan kepada regulator, termasuk penerapan SAK EP, masih diperlukan penyempurnaan lanjutan atas struktur data dan optimalisasi sistem informasi pelaporan. Namun demikian, penyesuaian tersebut telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana tindak lanjut yang ditetapkan.
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	BPR memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi sistem dan teknologi informasi masih terdapat gangguan sistem secara terbatas sebagai dampak penyesuaian terhadap perubahan ketentuan regulasi. Namun demikian, gangguan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran layanan dan operasional BPR serta dapat ditangani dan diselesaikan secara efektif dalam proses bisnis normal.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah
		Faktor Negatif	Evaluasi terhadap realisasi sistem informasi pelaporan telah dilaksanakan seiring dengan adanya perubahan regulasi yang signifikan pada tahun laporan, dan pada Semester II dilakukan penguatan serta penyesuaian sistem guna mendukung keandalan pelaporan secara berkelanjutan.

12. Rencana Bisnis BPR			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor	Keterangan
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun secara cukup realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR cukup baik menggambarkan rencana strategis jangka menengah dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPR cukup didukung oleh pemegang saham, diantaranya memperkuat permodalan dari pertumbuhan laba, infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun secara cukup realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris sebagian besar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis sudah dilakukan dengan baik, rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	2	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan sudah dilakukan dengan baik, dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
---	---	---	--

12. Kesimpulan Rencana Bisnis Bank			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR Hayura Artalola sebagian besar telah disusun secara realistis, cukup komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
		Faktor Negatif	Rencana bisnis, belum secara jelas menggambarkan dukungan rencana strategis pemegang saham dalam penguatan permodalan BPR, yang selama ini hanya tumbuh dari pemupukan pertumbuhan laba BPR
2	Proses Tata Kelola	Faktor Positif	Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang didukung oleh pemegang saham.
		Faktor Negatif	Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal.
3	Hasil Tata Kelola	Faktor Positif	Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
		Faktor Negatif	Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari realisasi hasil-hasil realiasi RBB di semua faktor dan indikator kinerja, untuk perbaikan kedepan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR HAYURA ARTALOLA

Nama BPR : HAYURA ARTALOLA

Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	2.27	2.14	2.35	2.09	2.00	2.44	2.55	2.00	2.41	2.20	2.25	2.29	2.25
Predikat Komposit	BAIK												

Kesimpulan Akhir
<p>Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum pada periode laporan kelemahan tersebut cukup signifikan namun dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.</p>
Faktor Positif
<p>Rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>A. Struktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2) Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik, Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik 3) Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan 4) Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko 5) BPR telah memiliki dan mengingkan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan 6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik 7) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan 8) Penugasan audit eksternal kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 9) BPR Hayura Artalola telah memenuhi persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk strategi anti fraud, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik 10) BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan mengingkan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR 11) BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Rencana bisnis BPR Hayura Artalola sebagian besar telah disusun secara realistis, cukup komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta

cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan

B. Proses

- 1) Pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak terlalu signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang cukup didukung oleh pemegang saham.
- 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
- 4) Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
- 5) Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja dan seluruh aspek bisnis telah dilakukan dengan cukup baik
- 6) Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh PE Kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- 7) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE audit intern berjalan dengan cukup baik serta hasil kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- 8) Proses pelaksanaan audit eksternal sesuai dengan cakupan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
- 9) Proses pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan strategi anti fraud berjalan baik sesuai dengan sifat dan kondisi pemilik risiko dapat diidentifikasi dan di mitigasi secara baik.
- 10) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit
- 11) BPR memiliki pelaporan internal dan eksternal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
- 12) Proses pelaksanaan realisasi Rencana bisnis BPR yang telah disusun dijadikan pedoman dan dasar setiap pengambilan kebijakan dan strategi yang diambil yang didukung oleh pemegang saham.

C. Hasil

- 1) Sebagian besar proses pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan fungsi dan tugasnya secara cukup baik melakukan tindak lanjut sebagian besar temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan

<p>yang bersifat administratif, kinerja perusahaan, dan pelaksanaan tata kelola pada dua periode pemeriksaan yang belum sepenuhnya di tindaklanjuti pada periode laporan, temuan lainnya sebagian besar terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian besar sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan realisasi bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 4) Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, sehingga belum ada outcome 5) Hasil penerapan dan penanganan benturan kepentingan berhasil cukup baik, tidak terjadinya benturan kepentingan yang signifikan yang dapat mempengaruhi laba dan berdampak terhadap kerugian BPR 6) Hasil penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja 7) Hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama secara cukup baik dan penyampaian laporan dilakukan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, cakupan hasil pemeriksaan LHP mencerminkan sebagian besar objek audit, temuan-temuan relatif dapat diselesaikan pada aktifitas bisnis normal, tidak terdapat temuan yang signifikan dapat mempengaruhi risiko operasional, kredit, likuiditas dan kepatuhan 8) Hasil audit Akuntan Publik (KAP) dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR 9) Pada periode laporan secara umum untuk profile risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas tergolong rendah, dengan kualitas penerapan manajemen risiko memadai, tidak terjadinya fraud. 10) Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, pelaporan BMPK dilaksanakan sesuai ketentuan 11) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah 12) Hasil Pencapaian Rencana bisnis hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
<p>Faktor Negatif</p>
<p>Rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>A. Struktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan pemenuhan penguatan permodalan sedikit terbatas 2) Salah satu anggota dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, namun tidak berdampak signifikan pengaruhnya terhadap setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS 3) BPR tidak wajib membentuk komite datau satuan kerja 4) Pedoman dan kebijakan perlu dilakukan evaluasi secara lebih progresif seperti ketentuan mengenai penunjukan penanggung jawab penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja 5) Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dari penunjukan audit eksternal 6) Pada Semester II, pelaksanaan fungsi Pejabat Eksekutif telah berjalan normal dan stabil, dengan tingkat pemahaman dan koordinasi yang semakin baik. Tidak terdapat faktor signifikan yang berdampak negatif terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara efektif

- 7) Pedoman dan kebijakan ketentuan BMPK yang dibuat BPR belum sepenuhnya mengatur dan memperhatikan profile debitur khususnya yang masuk dalam pihak terkait, terutama kriteria pengecualian dari ketentuan BMPK
- 8) BPR telah melakukan penyesuaian terhadap struktur dan infrastruktur sistem serta data pelaporan kepada pihak regulator seiring dengan pemberlakuan SAK EP. Proses penyesuaian tersebut telah berjalan dengan baik sehingga sistem dan informasi pelaporan telah dapat mendukung kebutuhan pelaporan secara memadai.
- 9) Rencana bisnis, belum secara jelas menggambarkan dukungan rencana strategis pemegang saham dalam penguatan permodalan BPR, yang selama ini hanya tumbuh dari pemupukan pertumbuhan laba BPR

B. Proses

- 1) Terdapat keterbatasan terhadap akses permodalan, dan pemenuhan kewajiban apabila secara darurat diperlukan dana tambahan dari pemegang saham
- 2) Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal
- 3) Potensi akan terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui RUPS
- 4) BPR tidak wajib membentuk komite datau satuan kerja
- 5) Proses pelaksanaan penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya dilaksanakan di setiap unit kerja dan level jabatan secara konsisten
- 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, temuan berulang yang terjadi pada periode sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan pada Semester II Tahun 2025, sehingga tidak lagi memberikan pengaruh signifikan terhadap proses penerapan tata kelola yang baik.
- 7) Ruang lingkup objek pemeriksaan PE audit internal masih belum secara optimal dilakukan terhadap semua lini unit kerja sebagaimana direncanakan dalam rencana kerja audit.
- 8) proses pelaksanaan audit eksternal telah semakin komprehensif dan hampir secara keseluruhan mampu menggambarkan permasalahan yang dihadapi BPR, tidak hanya terbatas pada aspek kinerja keuangan dan faktor-faktor dominan, namun juga mencakup aspek pendukung lainnya.
- 9) Dalam proses realisasi penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud pelaksanaannya kadang kurang konsisten pada tahapan mitigasi dan pemantauan, baik pada manajemen risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas.
- 10) Dalam proses pemberian kredit meskipun sudah memperhatikan ketentuan BMPK, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengukur profile debitur khususnya debitur debitur besar, seperti memperhatikan kemampuan bayar, dan sumber pembayaran., termasuk pada pihak terkait
- 11) Dalam proses realisasi system dan informasi terkadang masih terjadinya error system, yang disebabkan terjadinya penyesuaian system akibat penyesuaian dengan aturan regulasi, namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap proses layanan operasional, dan hal tersebut dapat teratasi segera dalam proses bisnis normal
- 12) Dalam proses realisasi RBB terkadang kurang konsisten menjadikan RBB sebagai pedoman pencapaian target yang ditentukan, terutama apabila terjadinya perubahan perubahan situasi kondisi internal dan eksternal

C. Hasil

- 1) Pada periode pelaporan Pada Semester II Tahun 2025, seluruh temuan pemeriksaan OJK yang

sebelumnya bersifat berulang pada dua periode berturut-turut telah ditindaklanjuti secara memadai. Kelemahan terkait potensi terjadinya benturan kepentingan telah diperbaiki melalui penyempurnaan ketentuan dan prosedur internal, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko signifikan terhadap penerapan tata kelola dan kepatuhan BPR.

- 2) Temuan yang bersifat administratif telah ditindaklanjuti, serta evaluasi terhadap independensi Direksi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya telah dilakukan secara berkala, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penerapan tata kelola dan kepatuhan.
- 3) Evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) telah dilakukan dan disesuaikan dengan seluruh faktor dan indikator kinerja, serta digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan bisnis ke depan.
- 4) BPR tidak wajib membentuk komite dan/atau satuan kerja
- 5) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap penanganan benturan kepentingan di setiap unit kerja
- 6) Belum sepenuhnya penerapan kepatuhan pada seluruh aspek bisnis, dan dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap setiap aspek usaha
- 7) Cakupan hasil pemeriksaan audit internal belum menggambarkan secara utuh permasalahan di setiap unit kerja yang berpotensi terjadinya risiko tinggi terhadap risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan dan likuiditas sebagai bahan perbaikan kedepan.
- 8) Belum dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dari hasil pemeriksaan KAP pada periode pemeriksaan untuk perbaikan kedepannya
- 9) Pada periode pelaporan, perbaikan atas kelemahan pengendalian Risiko Kepatuhan telah dilakukan, termasuk tindak lanjut atas temuan pemeriksaan rutin OJK. Namun demikian, tingkat Risiko Kepatuhan masih berada pada peringkat 3 (Sedang), mengingat temuan sebelumnya bersifat berulang dan masih memerlukan penguatan serta konsistensi penerapan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 10) Masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian terutama terhadap pinjaman pinjaman besar dan pihak terkait yang perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan
- 11) Pada periode pelaporan, sistem informasi pelaporan telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan regulasi yang cukup signifikan pada tahun laporan, sehingga secara umum telah mendukung penyampaian laporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12) Pada periode pelaporan, realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) telah dievaluasi secara menyeluruh dan hasilnya secara umum telah sesuai dengan target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RBB, serta menjadi dasar untuk peningkatan kinerja BPR ke depan.

1. OPINI AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan PT BPR Hyaura Artalola per 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Auditor Independen kantor Akuntan Publik Roebiandini dan Rekan dengan laporan auditor menyatakan bahwa laporan keuangan terampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2025

	catatan	2025	2024
ASET			
K a s	3	248.220.600	58.770.200
Giro pada bank lain	4	3.788.141.541	2.486.762.689
Pendapatan yang masih akan diterima	5	843.507.321	675.175.530
Penempatan pada bank lain	6	4.400.735.722	4.694.964.336
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(5.860.252)	(1.827.492)
Kredit yang diberikan	7	40.772.551.251	36.283.116.689
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(433.500.924)	(295.199.649)
Aset tetap	8	2.515.943.215	2.422.812.886
Akumulasi penyusutan aset tetap		(1.497.678.424)	(1.334.971.975)
Aset Pajak Tangguhan	9	33.089.525	-
Aset lain-lain	10	251.412.649	152.751.493
Jumlah Aset		50.916.562.223	45.142.354.707
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	11	30.982.664	37.446.602
Utang bunga	12	56.365.162	57.548.909
Utang pajak	13	842.308.184	175.881.262
Simpanan	14	36.695.392.952	32.897.996.012
Pinjaman diterima	15	2.492.271.852	4.066.075.962
Kewajiban lain-lain	16	214.814.320	164.886.120
Jumlah Kewajiban		40.332.135.134	37.399.834.867
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 100.000 lembar saham biasa nominal Rp50.000 per lembar per 31 Desember 2025 dan 2024 ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 44.000 lembar saham biasa.	17	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba			
Tidak ditentukan penggunaannya		7.344.427.089	4.502.519.840
Ditentukan penggunaannya		1.040.000.000	1.040.000.000
Jumlah Ekuitas		10.584.427.089	7.742.519.840
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		50.916.562.223	45.142.354.707

	<u>catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	18		
Bunga kontraktual		13.497.370.823	9.716.516.133
Provisi dan komisi		<u>564.585.342</u>	<u>478.107.527</u>
Total		14.061.956.165	10.194.623.660
Beban bunga	19	<u>1.873.513.229</u>	<u>1.758.255.036</u>
Pendapatan bunga - neto		12.188.442.936	8.436.368.624
Pendapatan operasional lainnya	20	<u>2.220.090.699</u>	<u>867.790.072</u>
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>14.408.533.635</u>	<u>9.304.158.696</u>
Beban penyisihan kerugian / penyusutan			
Beban penyisihan kerugian aset produktif	21		
Beban penyisihan kerugian tabungan / deposito		72.325.818	67.241.276
Beban penyisihan kerugian kredit		2.101.232.107	542.926.822
Beban amortisasi beban ditangguhkan		-	-
Beban penyusutan aset tetap		162.706.482	180.863.699
Beban pemasaran	22	89.984.700	118.924.635
Beban administrasi dan umum	23	<u>6.417.096.808</u>	<u>6.276.841.449</u>
Jumlah beban operasional lainnya		<u>8.843.345.916</u>	<u>7.186.797.881</u>
Pendapatan (beban) operasional lainnya		<u>(6.623.255.216)</u>	<u>(6.319.007.809)</u>
Laba (Rugi) Operasional		<u>5.565.187.720</u>	<u>2.117.360.815</u>
Pendapatan (beban) non operasional	24	<u>(78.181.842)</u>	5.888.836
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		<u>5.487.005.878</u>	<u>2.123.249.651</u>
Beban (penghasilan) pajak			
Taksiran pajak penghasilan	25	(1.073.127.189)	(380.729.774)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	26	<u>33.089.525</u>	-
Laba (Rugi) Bersih		<u>4.446.968.213</u>	<u>1.742.519.877</u>
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya			
Tahun Berjalan		-	-
Pajak Penghasilan atas Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya		-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		<u>4.446.968.213</u>	<u>1.742.519.877</u>

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	Modal Ditempatkan dan disetor	Saldo laba tidak ditetapkan penggunaannya	Saldo laba ditetapkan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	2.200.000.000	4.006.916.945	1.040.000.000	7.246.916.945
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan tantiem	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2024	-	(1.246.916.982)	-	(1.246.916.982)
Laba Bersih per 31 Desember 2024	-	1.742.519.877	-	1.742.519.877
Saldo per 31 Desember 2024	2.200.000.000	4.502.519.840	1.040.000.000	7.742.519.840
Penambahan setoran Modal	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan Tantiem tahun 2025	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2025	-	(1.605.060.964)	-	(1.605.060.964)
Laba Bersih per 31 Desember 2025	-	4.446.968.213	-	4.446.968.213
Saldo per 31 Desember 2025	2.200.000.000	7.344.427.089	1.040.000.000	10.584.427.089

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Laba/ Rugi Bersih	4.446.968.213	1.742.519.877
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	162.706.449	574.335
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	4.609.674.662	1.743.094.212
(Kenaikan) Penurunan dalam aset operasi :		
Pendapatan yang masih harus diterima	(168.331.791)	(64.323.913)
Penempatan pada bank lain	298.261.375	(2.974.477.397)
Kredit yang diberikan	(4.351.133.287)	(2.831.645.684)
Aset Pajak Tangguhan	(33.089.525)	-
Aset lain-lain	(98.661.156)	83.922.026
Kenaikan (Penurunan) dalam hutang operasi :		
Kewajiban segera	(6.463.938)	17.351.870
Utang bunga	(1.183.747)	3.285.306
Utang pajak	666.426.922	(30.555.158)
Simpanan	3.797.396.940	339.391.401
Pinjaman diterima	(1.573.804.110)	4.066.075.962
Kewajiban lain-lain	49.928.200	(4.665.418)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	3.189.020.545	347.453.225
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(93.130.329)	(245.091.134)
Penjualan/penghapusan aset tetap	-	180.289.400
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(93.130.329)	(64.801.734)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Dividen dan bonus	(1.605.060.964)	(1.246.916.982)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(1.605.060.964)	(1.246.916.982)
Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas	1.490.829.252	(964.265.491)
Kas dan setara kas pada awal periode	2.545.532.889	3.509.798.381
Kas dan setara kas pada akhir periode	4.036.362.141	2.545.532.889
Kas dan setara kas :		
Kas	248.220.600	58.770.200
Giro pada bank lain	3.788.141.541	2.486.762.689
Jumlah kas dan setara kas	4.036.362.141	2.545.532.889

1. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut "Bank" didirikan di Republik Indonesia yang bergerak dibidang jasa perbankan didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura sesuai dengan Akta Notaris No. 6 dari Notaris Komar Andasasmita dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538 HT.01.01.TH.91.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Tanggal 31 Januari 1994 Nomor : 218 Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH mengubah Nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor : C2-12.814 HT.01.04.th.95.

Bank telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-175/MK.13/1991 tanggal 6 Februari 1991.

Maksud dan tujuan dari Bank adalah membantu pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya perbankan.

Sebagai bank yang bergerak ke sektor usaha mikro dan kecil, BPR memainkan peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan perekonomian dengan pola-pola pendekatan yang lebih persuasif peningkatan pelayanan jemput bola secara langsung berhadapan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian bank, namun pada kenyataannya perkembangan BPR masih dihadapkan pada kendala-kendala baik kendala operasional maupun dengan para competitor dimana BPR harus mampu bersaing bukan hanya dengan Bank-bank umum yang membuka unit mikronya namun dengan Leasing dan pegadaian-pegadaian yang pada saat ini sudah beroperasi di setiap kota kecamatan

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat dengan kerja keras disamping memberikan pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga *customer* BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

Kantor operasional Bank berlokasi di Jl. Raya Pasir Jambu No.139 Ciwidey Kab.Bandung dan kantor kas yang terletak di jalan Soreang-Banjaran No.179 Kab.Bandung

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola No.08 Tanggal 22 Januari 2025 dengan Notaris Janti Rahmajanti, S.H

Dengan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sesuai Akta tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: H. Mutiq Yusmita Hadyat
Komisaris	: Tatan Suratman

Direksi	
Direktur Utama	: Hj. Teulis Ratna Komala
Direktur Operasional dan YMK	: Usep Subhan

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah dilakukan pengesahan Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0041744 tanggal 31 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 jumlah karyawan Bank masing-masing 44 orang. Jumlah yang dibayarkan kepada komisaris, direksi dan pihak-pihak lainnya sebesar Rp. 1.311.691.472 pada tahun 2025 dan Rp. 1.456.313.467 pada tahun 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan tahunan pertama yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan efektif per 1 Januari 2025, serta Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

b. Dampak Transisi SAK ETAP ke SAK EP

Tanggal transisi Perusahaan adalah 1 Januari 2025. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam SAK EP telah diterapkan secara prospektif untuk semua periode yang disajikan. Dampak transisi mencakup penyesuaian pada pos-pos utama laporan keuangan, seperti penyisihan penghapusan aset produktif dan penyesuaian estimasi pajak yang memengaruhi liabilitas pajak.

Perusahaan menggunakan pendekatan prospektif dan bukan retrospektif, hal ini dengan pertimbangan metode retrospektif tidak praktis diterapkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam sistem informasi.
2. Dampak perpajakan.
3. Penggunaan laba tahun lalu yang sudah digunakan.

c. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT. BPR Hayura Artalola disusun dengan dasar akrual berdasarkan biaya historis sebagai pengukuran utama, dengan pengecualian nilai wajar untuk instrumen keuangan tertentu, biaya kini untuk aset biologis (jika relevan), nilai realisasi untuk aset nonkeuangan, dan nilai sekarang untuk liabilitas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika memiliki likuiditas tinggi dan akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Mata uang pelaporan adalah Rupiah, dan bahasa pelaporan adalah bahasa Indonesia.

Laporan keuangan lengkap entitas privat terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan,
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
3. Laporan perubahan ekuitas,
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan

d. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto nomor 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991 yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal.
- Hubungan antara perusahaan dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari perusahaan tersebut.
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan atau dikendalikan oleh perusahaan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut.

Dalam kegiatan usahanya, BPR melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan Bab 33 SAK EP, yang mencakup identitas pihak berelasi, sifat hubungan, dan pengungkapan transaksi signifikan (seperti jenis, jumlah, syarat, dan jaminan). Transaksi diakui pada kondisi *arm's length* dan dievaluasi untuk dampak kesalahan penyajian. Pihak berelasi meliputi:

- (i) Dua entitas dengan direktur atau personel manajemen kunci yang sama, tetapi tidak memenuhi ketentuan pengendalian bersama atau signifikan;
- (ii) Dua venturer yang berbagi pengendalian bersama atas *joint venture*;
- (iii) Pihak-pihak dalam urusan normal yang memengaruhi BPR karena ketergantungan ekonomi, seperti penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan umum, departemen/instansi pemerintah, dan pelanggan/pemasok/distributor dengan volume transaksi signifikan.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tahun 2025 dan 2024 lihat catatan 28.

e. Giro pada bank lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada Bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank.

f. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan pendapatan bunga dari aset keuangan seperti kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, termasuk dari penempatan pada bank lain. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

g. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain merupakan penempatan tagihan atau simpanan milik Bank pada bank lain untuk menunjang operasional, memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve* yang terdiri dari giro pada bank lain, tabungan pada bank lain dan deposito pada bank lain. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan perusahaan. Dalam hal perusahaan membentuk penyisihan terjadinya kerugian dan penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

h. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan setara berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Diakui awal pada nilai wajar dan diukur kemudian pada biaya diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*). Kredit Sindikasi adalah kredit bersama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan proporsional, diakui sesuai porsi Bank jika memenuhi kriteria *joint arrangement*.

i. Penyisihan dan Cadangan atas Aset Produktif

Aset produktif terutama terdiri dari kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain. Tahun 2025, BPR menerapkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat serta Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Pengendali (SAK EP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, Perusahaan membentuk dua jenis penyisihan/cadangan:

1) Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

PPKA dibentuk untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai POJK No. 1/2024. PPKA terdiri dari :

- PPKA Umum, dibentuk minimum 0,5% atas saldo aset produktif dengan kualitas Lancar, kecuali untuk Surat Berharga Bank Indonesia/Pemerintah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- PPKA Khusus, dibentuk dengan tarif minimum progresif atas saldo aset produktif setelah dikurangi nilai agunan yang memenuhi syarat, sebagai berikut :

Klasifikasi	Persentase
- Lancar	0,50%
- Dalam Perhatian Khusus	3%
- Kurang Lancar	10%
- Diragukan	50%
- Macet	100%

Persentase penyisihan penghapusan diterapkan terhadap aset saldo produktif setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

2) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

- Selain PPKA, BPR wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EP) yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai penurunan nilai instrumen keuangan (penilaian *expected credit losses*). BPR menghitung CKPN dengan menggunakan metode migration berdasarkan jenis penggunaan kredit, yang memperhitungkan probabilitas migrasi kualitas kredit dan tingkat kerugian (*Loss Given Default/LGD*) pada masing-masing segmen portofolio.
- BPR memperhitungkan kedua cadangan ini sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/2024. Apabila jumlah CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA, selisihnya diperhitungkan sebagai pengurang modal. Sebaliknya, jika CKPN sama dengan atau lebih besar dari PPKA, hanya CKPN yang diperhitungkan.

3) Kebijakan yang Berlaku Sebagai Pembanding (Tahun Buku 2024)

Pada tahun 2024, penyisihan atas aset produktif dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

j. Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Bab 17 SAK EP, dengan review periodik umur manfaat dan nilai residu. Aset tetap disusutkan mulai bulan pengeluaran dilakukan atau pekerjaan selesai dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomi aset. Persentase penyusutan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bukan bangunan:		
Kelompok I	4	25,00%
Kelompok II	8	12,50%
Kelompok III	16	6,25%
Kelompok IV	20	5,00%
Bangunan:		
Permanen	20	5,00%
Bukan permanen	10	10,00%

Sesuai dengan kebijakan manajemen, Bank telah membentuk kebijakan batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.000.000.

k. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri atas perangkat lunak komputer yang diperoleh dan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tak berwujud ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya yakni lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam tingkat amortisasi, masa manfaat atau nilai residual aset takberwujud, amortisasi direvisi secara prospektif untuk mencerminkan perkiraan yang baru.

l. Penurunan nilai aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap, dan aset tak berwujud ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset yang terpengaruh (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan estimasian adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasian dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

m Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

n. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan

Pajak tangguhan bisa berupa Aset Pajak Tangguhan untuk pemulihan pajak di masa depan atau kewajiban pajak tangguhan untuk pajak terhutang di masa depan.

Pajak tangguhan tersebut timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas perusahaan dalam laporan posisi keuangan dan jumlah yang dapat diatribusikan kepada aset dan liabilitas tersebut oleh otoritas perpajakan (perbedaan tersebut dinamakan perbedaan temporer), serta akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan saat ini.

o. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan pada akhir periode akuntansi.

p. Liabilitas Segera Dibayar

Kewajiban segera dibayar adalah kewajiban yang telah jatuh tempo atau segera dapat ditagih, termasuk utang pajak, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Kewajiban ini diakui dan diukur pada nilai nominal.

q. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

r. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*). Beban bunga diakui secara akrual sebesar jumlah kewajiban Bank, termasuk beban terkait penghimpunan dana seperti hadiah dan *cash back*.

s. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau memiliki jangka waktu tertentu ditangguhkan serta diamortisasi berdasarkan metode selama jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh tempo, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang ditangguhkan diakui penuh pada saat pelunasan.

t. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja adalah kompensasi atau manfaat yang diberikan Perusahaan kepada karyawan setelah mereka tidak lagi bekerja.

Bank telah melaksanakan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan Bab 28 SAK EP (program imbalan pasti dengan pengakuan liabilitas aktuarial berdasarkan masa kerja dan kompensasi), serta ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Imbalan pasca kerja dibayarkan kepada karyawan pada saat mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, atau cacat tetap, dengan besarnya berdasarkan masa kerja dan kompensasi pada saat penyelesaian hubungan kerja.

- 1) **Kewajiban Imbalan Pascakerja Jangka Pendek**
Kewajiban imbalan pascakerja jangka pendek adalah kewajiban Perusahaan untuk membayar imbalan pasca kerja kepada karyawan selama tahun berjalan.
- 2) **Kewajiban Imbalan Pascakerja Jangka Panjang**
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka Panjang adalah liabilitas Perusahaan untuk membayar manfaat kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. Pengakuan ini dihitung menggunakan metode aktuarial, yang diukur berdasarkan nilai kini dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai liabilitas jangka panjang.

Perusahaan akan mengakui uang pesangon sebagai kewajiban dan beban hanya bilamana perusahaan mempunyai rencana pemutusan hubungan kerja formal dan tidak terdapat kemungkinan untuk membatalkannya.

Rencana pemutusan hubungan kerja mencakup :

- a. Jumlah karyawan serta fungsinya
- b. Jumlah uang pesangon untuk masing-masing karyawan
- c. Waktu melaksanakan rencana tersebut atau
- d. Menawarkan uang pesangon kepada karyawan agar mengundurkan diri secara sukarela

Bila terdapat karyawan mengundurkan diri diluar rencana pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan memahami kewajiban dan menjadi beban tahun berjalan yang dibayar secara tunai.

PT BPR Hayura Artalola untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut di atas, telah melaksanakan dengan cara membentuk tabungan DPLK pada Bank BNI dan kewajiban imbalan kerja lainnya. Posisi saldo pengembangan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 590.887.493 untuk DPLK BNI 46 dan JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp 1.230.847.442

u. **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan adalah beban atau manfaat pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan saat ini tetapi akan dibayar atau dipulihkan di masa mendatang, timbul karena perbedaan sementara (*temporary differences*) antara laba komersial (akuntansi) dan laba fiskal (pajak) yang akan hilang seiring waktu. Lihat Catatan 2.n.

v. **Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi**

Estimasi akuntansi melibatkan asumsi masa depan yang berpotensi penyesuaian material, seperti:

1. Penyisihan kerugian kredit berdasarkan proyeksi risiko kredit nasabah, dengan jumlah tercatat Rp. 433.500.924,- dan risiko fluktuasi ekonomi.
2. Kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto dan umur harapan hidup, dengan kewajiban tercatat Rp1.821.734.935,-.

3. KAS

Saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024 , dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Kas Teller	248.220.600	58.770.200
Jumlah	248.220.600	58.770.200

4. GIRO PADA BANK LAIN

Saldo rekening koran Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank lain, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Bank BNI LIK	3.061.320.112	2.297.772.801
Bank BJB Padalarang	505.403.008	5.869.938
Bank Central Asia	122.024.828	122.384.828
Bank BJB Soreang	45.792.129	4.545.265
Bank Rakyat Indonesia	35.588.813	35.517.713
Bank Niaga	11.027.329	11.387.328
Bank Danamon	4.003.241	6.002.735
Bank Negara Indonesia	2.032.081	2.332.081
Bank Mandiri	950.000	950.000
Jumlah	3.788.141.541	2.486.762.689

5. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan bunga yang masih akan diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Kredit Retail I	81.836.444	75.570.726
Kredit Retail II	454.702.615	370.773.236
Kredit Middle	121.615.606	105.281.154
Kredit Karyawan	9.936.843	9.752.580
Kredit Porsi Haji	439.418	566.461
Kredit Middle Special	155.858.795	101.843.193
Kredit Tanpa Agunan (KTA)	3.159.220	3.361.680
Kredit Motor Baru	1.977.853	-
Kredit Sertifikasi	13.980.527	8.026.500
Jumlah	843.507.321	675.175.530

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penanaman dana Bank dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tabungan		
Tabungan Danamon	1.924.167.765	1.964.848.550
Tabungan Bank Mandiri Kopo	2.109.780.354	2.057.705.158
Tabungan Bank Muamalat	171.207	531.205
BPR Karyajatnika Sadaya	366.616.396	671.879.424
Jumlah Tabungan	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>

Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas penempatan pada bank lain diklasifikasikan lancar.

Suku bunga penempatan pada Bank lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing 0,25% - 3,5% dan 0,25% - 3,5%

Tabungan yang dijadikan jaminan/agunan dari pinjaman diterima, sebesar Rp. 15.900.000,- Pada tahun 2025 dan Rp. 0,- pada tahun 2024.

Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kurang dari 1 bulan	4.400.735.722	4.694.964.336
Jumlah	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>

Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai penempatan pada Bank lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo awal	1.827.492	5.124.015
Penyisihan Periode Berjalan	72.325.818	67.241.276
Pemulihan CKPN	(68.293.058)	(70.537.799)
Saldo akhir	<u>5.860.252</u>	<u>1.827.492</u>
Penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk	5.860.252	1.827.492
Persentase CKPN yang telah dibentuk terhadap CKPN yang wajib dibentuk	100%	100%

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

Baki debit kredit per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri dari :

Jenis kredit :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kredit Retail I	3.847.358.980	151.180.777	21.687.309	5.799.754	7.775.563	4.033.802.383
Kredit Retail II	19.134.695.008	1.320.567.512	154.455.210	114.732.017	98.872.478	20.823.322.225
Kredit Middle	6.367.401.115	278.482.075	-	13.392.385	127.825.440	6.787.101.015
Kredit Karyawan	1.771.379.992	-	-	-	-	1.771.379.992
Kredit MSR	5.240.207.245	1.136.377.692	55.862.668	164.912.559	212.623.357	6.809.983.521
Kredit Sertifikasi	697.154.983	-	-	-	-	697.154.983
Kredit Porsi Haji	33.476.722	-	-	-	-	33.476.722
Kredit Motor Baru	143.958.227	-	-	-	-	143.958.227
Kredit Tanpa Agunan	151.205.396	-	-	15.374.152	-	166.579.548
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

Sektor ekonomi :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pertanian	11.018.192.188	707.474.017	110.997.421	42.067.975	113.191.725	11.991.923.326
Perindustrian	2.488.141.820	731.659.365	36.780.641	18.650.354	30.648.745	3.305.880.925
Perdagangan	10.382.196.511	1.059.409.369	55.213.748	225.442.934	185.856.988	11.908.119.550
Jasa	3.161.286.621	72.078.153	26.443.978	3.069.095	9.256.173	3.272.134.020
Konsumsi	10.337.020.528	315.987.152	2.569.399	24.980.509	108.143.207	10.788.700.795
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

Jangka Waktu :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kurang dari 1 tahun	26.813.734.054	837.926.835	25.286.592	-	-	27.676.947.481
1 - 5 tahun	10.573.103.614	2.048.681.221	206.718.595	314.210.867	447.096.838	13.589.811.135
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

Jenis Kredit :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kredit Retail I	3.832.190.641	83.184.297	11.997.671	4.477.809	52.311.203	3.984.161.621
Kredit Retail II	17.338.058.398	1.026.874.775	231.878.487	87.577.313	39.156.032	18.723.545.005
Kredit Middle	4.815.624.871	443.366.542	58.342.242	52.473.852	206.898.202	5.576.705.709
Kredit Karyawan	1.532.594.702	-	-	-	42.640.882	1.575.235.584
Kredit MSR	5.681.374.525	252.604.555	-	120.849.182	-	6.054.828.262
Kredit TOP	681.316.696	-	-	-	-	681.316.696
Kredit Porsi Haji	42.291.662	-	-	-	-	42.291.662
Kredit Tanpa Agunan	152.975.438	-	-	-	-	152.975.438
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Sektor Ekonomi :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian	9.418.094.963	644.519.278	167.208.838	72.398.437	52.311.203	10.354.532.771
Perindustrian	2.922.354.330	215.097.326	7.104.537	12.458.321	39.156.032	3.196.170.546
Perdagangan	10.325.015.879	700.194.258	84.014.512	40.174.169	206.898.202	11.356.297.020
Jasa	3.534.950.477	49.484.327	27.284.105	44.756.794	42.640.882	3.699.116.585
Konsumtif	7.876.011.284	196.734.980	16.606.408	95.590.435	-	8.184.943.107
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Jangka Waktu :

	2024					
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	664.683.773	200.000.000	-	-	-	864.683.773
1 - 5 tahun	33.411.743.160	1.606.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	35.926.376.204
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Dari jumlah kredit yang ada per 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut termasuk didalamnya kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp1.195.534.128,- dan sebesar Rp1.560.691.950,-.

Informasi pokok :

- a. Kredit dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh bank.
- b. Suku bunga kredit dalam rupiah periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 12% - 24% dan 12% - 18%
- c. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
- d. Kredit modal kerja diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja.
- e. Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk kesejahteraan yang dibebani bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 12% dan 12% dengan jangka waktu 5 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- f. Rasio Non-Performing Loan (NPL) perusahaan (secara bruto) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2,41 % dan 2,47 %.

Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo awal 01 Januari 2025 dan 2024	295.199.649	338.668.604
Penyisihan periode berjalan	2.101.232.107	542.926.822
Penghapusan kredit		-
Pemulihan	(1.962.930.832)	(586.395.777)
CKPN kredit yang telah dibentuk	433.500.924	295.199.649
CKPN kredit yang wajib dibentuk	433.500.924	295.199.649
Persentase CKPN yang telah dibentuk terhadap CKPN yang wajib dibentuk	100%	100%

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit tersebut.

8. ASET TETAP

Saldo nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Nilai Perolehan :	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	806.945.000	40.900.000	-	847.845.000
Inventaris Lainnya	164.686.434	10.726.350	-	175.412.784
Inventaris Peralatan kantor	461.064.144	41.503.979	-	502.568.123
Jumlah nilai perolehan	2.422.812.886	93.130.329	-	2.515.943.215
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	407.306.675	30.170.865	-	437.477.540
Kendaraan	375.493.459	94.497.917	-	469.991.376
Inventaris Lainnya	128.527.606	11.850.242	-	140.377.848
Inventaris Peralatan kantor	423.644.235	26.187.412	-	449.831.647
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.971.975	162.706.436	-	1.497.678.424
Nilai Buku	1.087.840.911			1.018.264.791

2024				
Nilai Perolehan :	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	787.184.400	200.050.000	180.289.400	806.945.000
Inventaris Lainnya	127.409.900	37.276.534	-	164.686.434
Inventaris Peralatan kantor	453.299.544	7.764.600	-	461.064.144
Jumlah nilai perolehan	2.358.011.152	245.091.134	180.289.400	2.422.812.886
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	377.135.810	30.170.865	-	407.306.675
Kendaraan	443.412.026	112.370.833	180.289.400	375.493.459
Inventaris Lainnya	117.488.986	11.038.620	-	128.527.606
Inventaris Peralatan kantor	396.360.818	27.283.417	-	423.644.235
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.397.640	180.863.735	180.289.400	1.334.971.975
Nilai Buku	1.023.613.512			1.087.840.911

Penambahan kendaraan tahun 2024 sebesar Rp 40.900.000 merupakan pembelian 2 unit kantor kendaraan operasional 2025.

Beban penyusutan tahun 2025 dan 2024 dicatat pada kelompok beban penyisihan kerugian dan penyusutan masing - masing sebesar Rp.162.706.436,- dan Rp.180.863.735,-.

9. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

2025				
	Saldo Awal	Dikreditkan pada laba rugi	Penghasilan Komperhensif lain	Saldo Akhir
Cadangan biaya pendidikan	-	33.089.525	-	33.089.525
Biaya penyusutan	-	-	-	-
Biaya imbalan kerja	-	-	-	-
Jumlah	-	33.089.525	-	33.089.525

2024				
	Saldo Awal	Dikreditkan pada laba rugi	Penghasilan Komperhensif lain	Saldo Akhir
Cadangan biaya pendidikan	-	-	-	-
Biaya penyusutan	-	-	-	-
Biaya imbalan kerja	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

10. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Sewa gedung	133.874.170	49.848.605
Persediaan ATK/barang cetakan	28.738.372	25.597.200
Persediaan materai tempel/teraan/perangko	3.380.000	5.190.000
Persediaan Map dan buku tabungan (Pass Book)	11.925.000	10.600.000
PPOB Hayura VSI	29.007.647	37.947.468
Tagihan Settlement VA Bank	26.492.160	16.466.720
Tagihan Settlement Alfamart	2.428.600	6.761.500
Tagihan Settlement Indomaret	566.700	340.000
Uang Muka macam-macam biaya	15.000.000	-
Jumlah	251.412.649	152.751.493

11. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Asuransi	16.457.664	32.696.602
Notaris	14.525.000	4.750.000
Jumlah	30.982.664	37.446.602

12. UTANG BUNGA

Utang bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Bunga tabungan	1.887.109	1.716.501
Bunga deposito	43.730.767	38.712.619
Bunga pinjaman diterima	6.669.661	10.325.328
Bunga jatuh tempo	4.077.625	6.794.461
Jumlah	56.365.162	57.548.909

13. UTANG PAJAK

Utang pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
PPH bunga tabungan	9.474.251	8.603.263
PPH bunga deposito	9.362.731	9.045.129
PPH pasal 25 dan 29	762.125.746	153.355.219
PPH pasal 21	61.328.300	4.746.677
PPH pasal 23	17.156	130.974
Jumlah	842.308.184	175.881.262

PPH pasal 25/29 sebesar Rp762.125.746 merupakan utang kekurangan pph pasal 29 Tahun 2025.

14. SIMPANAN

Saldo simpanan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Tabungan	21.165.792.952	19.350.396.012
Deposito berjangka	15.529.600.000	13.547.600.000
Jumlah	<u>36.695.392.952</u>	<u>32.897.996.012</u>

Tabungan

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan periode 31 Desember 2025 dan 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar 3% - 4% per tahun dan 3% - 4% per tahun.

Jumlah tabungan yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank masing-masing sebesar Rp135.831.986 dan Rp123.807.000.

Terdapat tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 15.900.000, dan Rp. 0.

	2025	2024
Deposito berjangka menurut jangka waktunya :		
1 bulan	250.000.000	500.000.000
3 bulan	7.505.000.000	5.679.500.000
6 bulan	4.807.300.000	4.240.000.000
12 bulan	2.967.300.000	3.128.100.000
Jumlah	<u>15.529.600.000</u>	<u>13.547.600.000</u>

Jumlah deposito berjangka yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 150.000.000. Deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR masing-masing sebesar Rp. 173.300.000 dan Rp. 0. Tingkat suku bunga deposito berjangka periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing antara 3,75 % - 6 % dan 4% - 6,75%.

15. PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Pinjaman yang diterima lainnya - Bank lain :		
- BPR Karyaajatnika Sadaya	2.528.874.924	4.130.131.338
Dikurangi :		
Biaya provisi	(22.857.136)	(39.999.988)
Biaya transaksi	(13.745.936)	(24.055.388)
Jumlah Pinjaman Diterima	<u>2.492.271.852</u>	<u>4.066.075.962</u>

- **BPR KARYAJATNIKA SADAYA**

Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor : SPPK/017/Maret/2024 tanggal 17 Mei 2024

Kredit	Rp 5.000.000.000
	Rp 4.000.000.000 KAB-LB 1
	Rp 1.000.000.000 KAB-LB 2
Keperluan	Modal kerja BPR
Bentuk	KAB-LB SME
Suku bunga	9% Efektif setara dengan 4.83% Flat
Jangka Waktu	36 Bulan
Jaminan	- 1 Unit T/B di Jl. Raya Propinsi No. 139 Desa. Pasirjambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung-SHGB No. 2 a.n PT. Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola (LT:389 m2, LB: 386.33 m2 masa berakhir hak guna bangunan : 06/12/2041)
	- Cessie Piutang Lancar 110% dari outstanding kredit

16. KEWAJIBAN LAIN – LAIN

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cadangan pendidikan	150.406.931	141.747.958
Angsuran Bunga	-	5.203.162
Rekening selisih Kas	41.487.389	-
Lainnya	22.920.000	17.935.000
Jumlah	<u>214.814.320</u>	<u>164.886.120</u>

Cadangan Pendidikan adalah dana cadangan Pendidikan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan POJK 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah, yaitu sebesar 3% dari biaya personalia (biaya tenaga kerja) tahun lalu.

17. MODAL

Modal Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Modal dasar	8.000.000.000	5.000.000.000
Modal belum ditempatkan dan disetor	(5.800.000.000)	(2.800.000.000)
Modal yang telah ditempatkan dan disetor	<u>2.200.000.000</u>	<u>2.200.000.000</u>

Modal disetor tersebut telah dicatat dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No.AHU-11809.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 07 Oktober 2010 dan telah dicatat dalam administrasi bank Indonesia dengan surat No.12/655/DKBU/IDAd/Bd tanggal 26 Mei 2010. Perubahan komposisi penambahan modal disetor tahun 2010 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas Bank Indonesia sesuai dengan surat Nomor :13/86/DKBU/IDAd/Bd tanggal 25 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola No 12 Tanggal 31 Oktober 2025 pada notaris Janti Rahmajanti, S.H, menyetujui perubahan modal dasar dari sebesar Rp. 5.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000.

Selanjutnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0077380.AH.01.02.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola pada tanggal 19 Februari 2025 No 03, menyetujui jual beli saham Perseroan Terbatas dari ahli waris almarhum Dedi Rusami dengan demikian, komposisi saham BPR menjadi :

Nama Pemegang Saham	2025			2024		
	%	Lembar	Nominal	%	Lembar	Nominal
H. Mutiq Yusmita Hadyat	47	20.540	1.027.000.000	47	20.540	1.027.000.000
Hj. Gusti Nurmahrита	51	22.380	1.119.000.000	51	22.380	1.119.000.000
Dedi Rusamsi	-	-	-	2	1.080	54.000.000
Tatan Suratman	1	540	27.000.000	-	-	-
Teulis Ratna Komala	1	540	27.000.000	-	-	-

Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cadangan umum	1.040.000.000	1.040.000.000
	<u>1.040.000.000</u>	<u>1.040.000.000</u>

18. PENDAPATAN BUNGA

Bunga yang diperoleh per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :
Bunga kontraktual

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Penempatan pada bank lain	63.524.611	58.311.863
Kredit yang diberikan	13.003.766.561	9.223.144.120
Bunga lainnya	430.079.650	435.060.150
Jumlah Bunga Yang Diperoleh	<u>13.497.370.823</u>	<u>9.716.516.133</u>
Provisi dan komisi per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:		
Modal kerja	565.261.742	478.967.396
Bunga kredit - adm	(676.400)	(859.869)
Jumlah Provisi dan Komisi	<u>564.585.342</u>	<u>478.107.527</u>

19. BEBAN BUNGA

Beban bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pihak ketiga bank lain		
Beban bunga deposito	418.384.011	408.662.133
Beban bunga pinjaman diterima	303.073.519	253.448.266
Beban bunga ABP lainnya	7.287.600	7.394.900
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Bank Lain	<u>728.745.130</u>	<u>669.505.299</u>

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pihak ketiga		
Beban bunga tabungan	535.490.109	507.948.730
Beban bunga deposito	516.464.137	497.127.798
Beban bunga pinjaman diterima	-	-
Beban bunga provisi	17.142.852	10.000.012
Beban bunga biaya transaksi	10.309.452	6.013.928
Beban bunga pihak ketiga lainnya	65.361.549	67.659.269
Jumlah Beban Pihak Ketiga	<u>1.144.768.099</u>	<u>1.088.749.737</u>
Jumlah Beban Bunga	<u>1.873.513.229</u>	<u>1.758.255.036</u>

20. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Tabungan/deposito	69.270.059	69.359.872
Denda kredit	155.406.613	155.642.267
Penghapusan kredit diberikan	5.009.427	4.077.800
Pemulihan Aktiva Produktif	1.910.351.906	573.923.902
Payment Point	4.818.895	5.997.106
Pinalti	570.786	545.228
Administrasi lainnya	8.922.800	8.896.400
Lainnya	65.740.214	49.347.497
Jumlah	2.220.090.699	867.790.072

21. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

Beban penyisihan kerugian/penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Penyisihan		
- Bank Non Giro	72.325.818	67.241.276
- Kredit yang diberikan	2.101.232.107	542.926.822
Jumlah beban penyisihan aset produktif	2.173.557.925	610.168.098
Penyusutan		
- Beban penyusutan aset tetap	162.706.482	180.863.699
Jumlah beban penyusutan aset tetap	162.706.482	180.863.699
Jumlah beban penyisihan/penyusutan	2.336.264.408	791.031.797

22. BEBAN PEMASARAN

Beban pemasaran per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban promosi dan iklan	89.984.700	118.924.635
Jumlah Beban Pemasaran	<u>89.984.700</u>	<u>118.924.635</u>

23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum merupakan beban karyawan, beban administrasi dan umum dan beban operasional lainnya terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban karyawan	5.112.526.139	5.013.564.382
Beban pendidikan	184.472.695	156.339.198
Beban sewa	77.792.961	75.257.725
Beban premi asuransi	208.777.419	224.986.979
Beban barang dan jasa	419.194.348	376.970.809
Pajak (kendaraan & lainnya)	12.830.000	19.011.782
Beban pemeliharaan dan perbaikan	338.516.114	347.387.805
Beban operasional lainnya	62.987.132	63.322.769
Jumlah	<u>6.417.096.808</u>	<u>6.276.841.449</u>

Beban karyawan sebesar Rp 5.112.526.139 termasuk di dalamnya setoran JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan dan setoran DPLK.

24. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan non operasional :		
Selisih kas	9.449	11.112
Lainnya	5.729.428	79.676.238
Jumlah pendapatan non operasional	<u>5.738.877</u>	<u>79.687.350</u>
Beban non operasional :		
Beban sumbangan/hadiah	9.150.000	45.144.800
Beban selisih kas	10.969	10.014
Lainnya	74.759.750	28.643.700
Jumlah beban non operasional	<u>83.920.719</u>	<u>73.798.514</u>
Jumlah	<u>(78.181.842)</u>	<u>5.888.836</u>

25. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara laba komersil sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	5.487.005.878	2.123.249.651
Beda tetap:		
- Pendapatan Tabungan dan Deposito	(63.524.611)	(69.359.872)
- Beban operasional lainnya	62.987.132	63.322.769
- Beban sumbangan	9.150.000	45.144.800
- Biaya non operasional lainnya	10.969	10.014
- Beban Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain	14.395	
- Biaya lain-lainnya	74.759.750	28.643.700
Jumlah	<u>83.397.635</u>	<u>67.761.411</u>
Beda Waktu:		
- Cadangan biaya pendidikan	150.406.931	14.683.798
Jumlah	<u>150.406.931</u>	<u>14.683.798</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	5.720.810.443	2.205.694.860
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	5.720.810.443	2.205.694.860

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$4.800.000.000 \times 5.720.810.443 = 1.685.919.164$$

$$16.287.785.741$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$5.720.810.443 - 1.685.919.164 = 4.034.891.279$$

Pajak penghasilan 2025

$$50\% \times 22\% \times 1.685.919.164 = 185.451.108$$

$$22\% \times 4.034.891.279 = 887.676.081$$

Jumlah pajak penghasilan

Pajak dibayar dimuka-PPH Pasal 25
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29

$$\underline{\underline{1.073.127.189}}$$

$$(311.001.443)$$

$$\underline{\underline{762.125.746}}$$

Pajak penghasilan 2024

$$50\% \times 22\% \times 950.209.951 = 104.523.095$$

$$22\% \times 1.255.484.909 = 276.206.680$$

Jumlah pajak penghasilan

Pajak dibayar dimuka-PPH Pasal 25
(Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29

$$\underline{\underline{380.729.774}}$$

$$(227.374.556)$$

$$\underline{\underline{153.355.218}}$$

Pada tahun 2021, tarif perhitungan PP badan berubah menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

26. Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan

	2025	2024
Cadangan biaya pendidikan	33.089.525	-
Jumlah	33.089.525	-

27. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Aset kontinjensi	2025	2024
Bunga kredit yang diberikan	461.486.421	389.892.936
Aset produktif yang dihapus buku	882.652.395	819.250.053
Jumlah aset komitmen dan kontinjensi	1.344.138.815	1.209.142.988

28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usahanya, PT BPR Hayura Artalola melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan karyawan kunci Bank dan pemegang saham antara lain sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan istimewa	Transaksi
H. Mutiq Yusmita Hadyat	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Hj.Gusti Nurmahrta	Pemegang Saham	Kredit dan Tabungan
Tatan Suratman	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Teulis Ratna Komala	Direksi dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Usep Subhan	Direksi	Kredit dan Tabungan

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta prosentasenya terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 605.500.000 dan Rp1.102.500.008 dengan presentase terhadap modal inti dan modal pelengkap sebesar 5,72% dan 32,8%.
- b. Deposito berjangka diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp150.000.000 dengan presentase terhadap jumlah simpanan deposito sebesar 0% dan 0,52%.
- c. Tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 246.323.487 dan Rp123.807.000 dengan presentase terhadap jumlah simpanan tabungan sebesar 1,16% dan 0,43%.

29. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban pada Bank-bank lokal. Dan untuk Pelaksanaan Program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebankan premi berkaitan dengan program penjaminan tersebut sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

30. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sedikitnya mencakup :

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pengendalian Intern
- Sistem Informasi Management
- Sumber Daya Manusia

Direksi bertanggung jawab atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut.

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(dalam rupiah penuh)

KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	ATMR
1. Kas	248.220.600	0%	-
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0%	-
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	636.966.688	0%	-
4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	-	15%	-
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	8.142.913.927	20%	1.628.582.785
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.			
a. Kredit kepada bank lain	-	20%	-
b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	20%	-
c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	20%	-
d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	20%	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	20%	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	9.017.496.919	30%	2.705.249.076
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20 %.			
a. Kredit Kepada BUMN/BUMD	-	50%	-
b. Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50%	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan.	-	50%	-
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	3.184.463.577	50%	1.592.231.789
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	18.786.695.376	70%	13.150.686.763
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu	741.952.644	70%	519.366.851
15. Tagihan atau kredit lainnya yg tidak memenuhi kriteria bobot resiko diatas	8.943.099.895	100%	8.943.099.895
16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet			
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	22.655.155	100%	22.655.155
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	241.017.829	100%	241.017.829
17. Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud	1.018.264.791	100%	1.018.264.791
18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	100%	-
19. Aset lainnya selain tersebut di atas.	1.094.919.970	100%	1.094.919.970
Jumlah AT MR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum	-	0%	-
Selisih lebih PPAP Umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/	-	-	-
Jumlah ATMR	52.078.667.371	0%	30.916.074.904

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)

d. Kualitas Aktiva Produktif

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Kredit	Surat Berharga	Penempatan pada Bank Lain	Jumlah
1. Aktiva Produktif				
- Lancar	37.386.837.668	-	8.188.877.263	45.575.714.931
- Dalam Perhatian Khusus	2.886.608.056	-	-	2.886.608.056
- Kurang Lancar	232.005.187	-	-	232.005.187
- Diragukan	314.210.867	-	-	314.210.867
- Macet	447.096.838	-	-	447.096.838
Jumlah	41.266.758.616	-	8.188.877.263	49.455.635.879
2. Aktiva Produktif				
Yang Diklasifikasikan				
- Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
- Kurang Lancar (50%)	232.005.187	-	-	232.005.187
- Diragukan (75%)	314.210.867	-	-	314.210.867
- Macet (100%)	447.096.838	-	-	447.096.838
Jumlah	993.312.892	-	-	993.312.892
3. PPAWD				
- Lancar (0,5%)	173.666.248	-	5.860.252	179.526.500
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	16.645.292	-	-	16.645.292
- Kurang Lancar (10%)	3.635.036	-	-	3.635.036
- Diragukan (50%)	39.321.196	-	-	39.321.196
- Macet (100%)	206.079.009	-	-	206.079.009
Jumlah	439.346.781	-	5.860.252	445.207.033
Rasio - Rasio	a. $\frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\% =$			2,01%
	b. $\frac{\text{Penyisihan penghapusan Aktiva produktif}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\% =$			100%

e. Aset Tetap Terhadap Modal

$$\frac{1.018.264.791}{2.200.000.000} \times 100\% = 46,28\%$$

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (lanjutan)
f. Loan to Deposit Ratio

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	Nominal	Prosentase (%)
1. Simpanan Pihak Ke III		
1.1 Simpanan Berjangka	5.800.000.000	32.59%
1.2 Tabungan	21.165.792.952	46.55%
2. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan*	2.528.874.924	
3. Modal Pinjaman	-	-
4. Modal Inti	8.360.942.983	16.52%
5. Jumlah Dana Pihak Ke III	37.855.610.859	95.67%
6. Aktiva Produktif		
6.1 Kredit yang diberikan**	41.266.758.616	100%
6.2 Kredit yang diberikan kepada bank lain**	-	-
6.3 Lainnya	-	-
7. Jumlah Aktiva Produktif	41.266.758.616	
8. LDR {6(1+2+3) : 5} x 100%	109,01%	

g. Return on Asset (ROA)

$$\frac{5.487.005.878}{50.916.562.223} \times 100\% = 10,78\%$$

h. Return on Earning (ROE)

$$\frac{5.487.005.878}{8.539.623.850} \times 100\% = 64,25\%$$

i. Cash Ratio

$$\frac{8.437.097.860}{30.930.453.240} \times 100\% = 27,28\%$$

j. Beban Operasional Pendapatan Operasional

$$\frac{10.716.844.750}{16.282.046.860} \times 100\% = 65,82\%$$

30. INFORMASI LAIN

Kredit tahun 2025 mengalami pertumbuhan dari posisi tahun 2024 sebesar 10.85% dan dana pihak ketiga tumbuh hanya 0,07% hambatan karena usaha yang mengalami kontraksi, resiko kredit yang meningkat membuat BPR harus selektif dalam memberikan kredit. Disamping itu, BPR menjaga likuiditas yang kondisinya terbatas karena dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito juga masih tertekan.

Secara keseluruhan total aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp 50.916.562.223 mengalami kenaikan sebesar 11,34 %, dibandingkan total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.142.354.726.

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang diselesaikan masing-masing pada bulan Februari 2025 dan 2024.

Penutup

Laporan Keuangan Tahunan tahun 2024 ini merupakan gambaran kinerja selama kurun waktu satu tahun dengan kesimpulan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola masih mampu menunjukkan kinerja yang baik walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan juga penurunan daya beli masyarakat, selanjutnya management terus berupaya pencapaian hasil usaha di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan dengan harapan BPR dapat terus tumbuh dan berkembang secara wajar.

Demikian Laporan Keuangan Tahunan ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dimasa yang akan datang.

Ciwidey, 14 April 2026
PT BPR HAYURA ARTALOLA



TEULIS RATNA KOMALA
Direktur Utama



USEP SUBHAN
Dir. Oprs & YMFK



PT BPR HAYURA ARTALOLA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Pusat: Jl. Pasirjambu No. 139 Ciwidey – Bandung 40972
Telp. (022) 5928680 Fax. (022) 5929008
Kantor Kas: Jl. Soreang Banjaran No. 179 Ciburial – Soreang, Bandung 40911
Telp. (022) 85871693

**PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5



PT. BPR HAYURA ARTALOLA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BPR HAYURA ARTALOLA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Teulis Ratna Komala
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasirjambu No.139 RT 01 RW 07 Desa Pasirjambu
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung 40973
Alamat Domisili : Kp. Ciwidey Kulon RT 01 RW 13 Desa Ciwidey
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung 40972
Nomor Telepon : 081221107076
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Hayura Artalola;
2. Laporan Keuangan PT BPR Hayura Artalola telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP);
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Hayura Artalola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam BPR Hayura Artalola.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 23 Februari 2026



Hj. Teulis Ratna Komala
Direktur Utama



Roebian dini dan Rekan

Registered Public Accountants

Ijin : KEP MENKEU RI No.684/KM.1/2008

Nomor : 00003/2.0756/AU.8/07/1055-2/1/II/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT BPR Hayura Artalola
Jl. Raya Pasirjambu No. 139 Pasirjambu
Bandung

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Hayura Artalola, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada catatan 2 huruf "a" dan "b" atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PT BPR Hayura Artalola menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Mulai tanggal 1 Januari 2025, perusahaan menerapkan SAK EP secara prospektif.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Roebiadini dan Rekan

Partner,



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'R' and 'S'.

Rudiana, M.Ak., Ak., CPSAK., CA., CPA

NRAP : AP.1055

NIUKAP.684/KM.1/2008

23 Februari 2026

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	catatan	2025	2024
ASET			
K a s	3	248.220.600	58.770.200
Giro pada bank lain	4	3.788.141.541	2.486.762.689
Pendapatan yang masih akan diterima	5	843.507.321	675.175.530
Penempatan pada bank lain	6	4.400.735.722	4.694.964.336
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(5.860.252)	(1.827.492)
Kredit yang diberikan	7	40.772.551.251	36.283.116.689
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(433.500.924)	(295.199.649)
Aset tetap	8	2.515.943.215	2.422.812.886
Akumulasi penyusutan aset tetap		(1.497.678.424)	(1.334.971.975)
Aset Pajak Tangguhan	9	33.089.525	-
Aset lain-lain	10	251.412.649	152.751.493
Jumlah Aset		<u>50.916.562.223</u>	<u>45.142.354.707</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	11	30.982.664	37.446.602
Utang bunga	12	56.365.162	57.548.909
Utang pajak	13	842.308.184	175.881.262
Simpanan	14	36.695.392.952	32.897.996.012
Pinjaman diterima	15	2.492.271.852	4.066.075.962
Kewajiban lain-lain	16	214.814.320	164.886.120
Jumlah Kewajiban		<u>40.332.135.134</u>	<u>37.399.834.867</u>
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 100.000 lembar saham biasa nominal Rp50.000 per lembar per 31 Desember 2025 dan 2024 ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 44.000 lembar saham biasa.	17	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba			
Tidak ditentukan penggunaannya		7.344.427.089	4.502.519.840
Ditentukan penggunaannya		1.040.000.000	1.040.000.000
Jumlah Ekuitas		<u>10.584.427.089</u>	<u>7.742.519.840</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		<u>50.916.562.223</u>	<u>45.142.354.707</u>

Bandung, 23 Februari 2026

Direktur Utama

Hj. Teulis Ratna Komala



Direktur

Usep Subhan

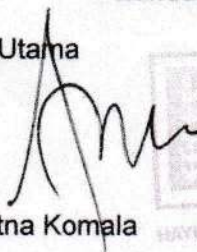
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

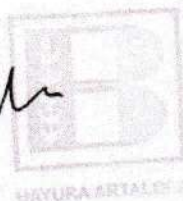
	catatan	2025	2024
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	18		
Bunga kontraktual		13.497.370.823	9.716.516.133
Provisi dan komisi		564.585.342	478.107.527
Total		<u>14.061.956.165</u>	<u>10.194.623.660</u>
Beban bunga	19	<u>1.873.513.229</u>	<u>1.758.255.036</u>
Pendapatan bunga - neto		12.188.442.936	8.436.368.624
Pendapatan operasional lainnya	20	<u>2.220.090.699</u>	<u>867.790.072</u>
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>14.408.533.635</u>	<u>9.304.158.696</u>
Beban penyisihan kerugian / penyusutan	21		
Beban penyisihan kerugian aset produktif			
Beban penyisihan kerugian tabungan / deposito		72.325.818	67.241.276
Beban penyisihan kerugian kredit		2.101.232.107	542.926.822
Beban amortisasi beban ditangguhkan		-	-
Beban penyusutan aset tetap		162.706.482	180.863.699
Beban pemasaran	22	89.984.700	118.924.635
Beban administrasi dan umum	23	6.417.096.808	6.276.841.449
Jumlah beban operasional lainnya		<u>8.843.345.916</u>	<u>7.186.797.881</u>
Pendapatan (beban) operasional lainnya		<u>(6.623.255.216)</u>	<u>(6.319.007.809)</u>
Laba (Rugi) Operasional		<u>5.565.187.720</u>	<u>2.117.360.815</u>
Pendapatan (beban) non operasional	24	<u>(78.181.842)</u>	<u>5.888.836</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		<u>5.487.005.878</u>	<u>2.123.249.651</u>
Beban (penghasilan) pajak			
Taksiran pajak penghasilan	25	(1.073.127.189)	(380.729.774)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	26	<u>33.089.525</u>	<u>-</u>
Laba (Rugi) Bersih		<u>4.446.968.213</u>	<u>1.742.519.877</u>
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya			
Tahun Berjalan		-	-
Pajak Penghasilan atas Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya		-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		<u>4.446.968.213</u>	<u>1.742.519.877</u>

Bandung, 23 Februari 2026

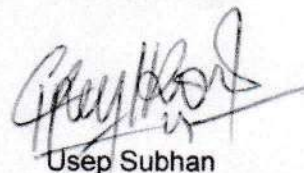
Direktur Utama



Hj. Teulis Ratna Komala



Direktur



Usep Subhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

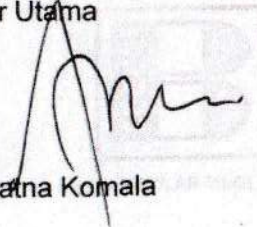
PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan disetor	Saldo laba tidak ditetapkan penggunaannya	Saldo laba ditetapkan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	2.200.000.000	4.006.916.945	1.040.000.000	7.246.916.945
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan tantiem	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2024	-	(1.246.916.982)	-	(1.246.916.982)
Laba Bersih per 31 Desember 2024	-	1.742.519.877	-	1.742.519.877
Saldo per 31 Desember 2024	2.200.000.000	4.502.519.840	1.040.000.000	7.742.519.840
Penambahan setoran Modal	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan Tantiem tahun 2025	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2025	-	(1.605.060.964)	-	(1.605.060.964)
Laba Bersih per 31 Desember 2025	-	4.446.968.213	-	4.446.968.213
Saldo per 31 Desember 2025	2.200.000.000	7.344.427.089	1.040.000.000	10.584.427.089

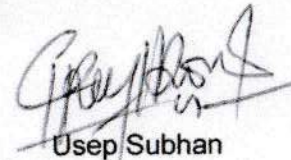
Bandung, 23 Februari 2026

Direktur Utama



Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur



Usep Subhan

*Catatan atas laporan keuangan
 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PT BPR HAYURA ARTALOLA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Laba/ Rugi Bersih	4.446.968.213	1.742.519.877
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	162.706.449	574.335
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	4.609.674.662	1.743.094.212
(Kenaikan) Penurunan dalam aset operasi :		
Pendapatan yang masih harus diterima	(168.331.791)	(64.323.913)
Penempatan pada bank lain	298.261.375	(2.974.477.397)
Kredit yang diberikan	(4.351.133.287)	(2.831.645.684)
Aset Pajak Tangguhan	(33.089.525)	-
Aset lain-lain	(98.661.156)	83.922.026
Kenaikan (Penurunan) dalam hutang operasi :		
Kewajiban segera	(6.463.938)	17.351.870
Utang bunga	(1.183.747)	3.285.306
Utang pajak	666.426.922	(30.555.158)
Simpanan	3.797.396.940	339.391.401
Pinjaman diterima	(1.573.804.110)	4.066.075.962
Kewajiban lain-lain	49.928.200	(4.665.418)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	3.189.020.545	347.453.225
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(93.130.329)	(245.091.134)
Penjualan/penghapusan aset tetap	-	180.289.400
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(93.130.329)	(64.801.734)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Dividen dan bonus	(1.605.060.964)	(1.246.916.982)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(1.605.060.964)	(1.246.916.982)
Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas	1.490.829.252	(964.265.491)
Kas dan setara kas pada awal periode	2.545.532.889	3.509.798.381
Kas dan setara kas pada akhir periode	4.036.362.141	2.545.532.889
Kas dan setara kas :		
Kas	248.220.600	58.770.200
Giro pada bank lain	3.788.141.541	2.486.762.689
Jumlah kas dan setara kas	4.036.362.141	2.545.532.889

Bandung, 23 Februari 2026

Direktur Utama

Hj. Teulis Ratna Komala

Direktur

Usep Subhan

Catatan atas laporan keuangan

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola selanjutnya disebut "Bank" didirikan di Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan didirikan pada tanggal 20 Desember 1990 dengan nama PT BPR Hayura sesuai dengan Akta Notaris No. 6 dari Notaris Komar Andasasmita dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Mei 1991 Nomor : C2-1.538 HT.01.01.TH.91.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Tanggal 31 Januari 1994 Nomor : 218 Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH mengubah Nama PT BPR Hayura menjadi PT BPR Hayura Artalola dan telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1995 Nomor : C2-12.814 HT.01.04.th.95.

Bank telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-175/MK.13/1991 tanggal 6 Februari 1991.

Maksud dan tujuan dari Bank adalah membantu pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya perbankan.

Sebagai bank yang bergerak ke sektor usaha mikro dan kecil, BPR memainkan peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan perekonomian dengan pola-pola pendekatan yang lebih persuasif peningkatan pelayanan jemput bola secara langsung berhadapan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian bank, namun pada kenyataannya perkembangan BPR masih dihadapkan pada kendala-kendala baik kendala operasional maupun dengan para kompetitor dimana BPR harus mampu bersaing bukan hanya dengan Bank-bank umum yang membuka unit mikronya namun dengan Leasing dan pegadaian-pegadaian yang pada saat ini sudah beroperasi di setiap kota kecamatan

Perkembangan yang telah dicapai selama ini didapat dengan kerja keras disamping memberikan pelayanan yang terbaik PT BPR Hayura Artalola juga senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan yang kompetitif sehingga *customer* BPR Hayura tidak berpaling ke bank yang lain.

Kantor operasional Bank berlokasi di Jl. Raya Pasir Jambu No.139 Ciwidey Kab.Bandung dan kantor kas yang terletak di jalan Soreang-Banjarian No.179 Kab.Bandung

Berdasarkan Akta Keterangan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola No.08 Tanggal 22 Januari 2025 dengan Notaris Janti Rahmajanti, S.H

Dengan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sesuai Akta tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Mutiq Yusmita Hadyat
Komisaris : Tatan Suratman

Direksi

Direktur Utama : Hj. Teulis Ratna Komala
Direktur Operasional : Usep Subhan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah dilakukan pengesahan Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0041744 tanggal 31 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 jumlah karyawan Bank masing-masing 44 orang. Jumlah yang dibayarkan kepada komisaris, direksi dan pihak-pihak lainnya sebesar Rp1.311.691.472 pada tahun 2025 dan Rp1.456.313.467 pada tahun 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan tahunan pertama yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan efektif per 1 Januari 2025, serta Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

b. Dampak Transisi SAK ETAP ke SAK EP

Tanggal transisi Perusahaan adalah 1 Januari 2025. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam SAK EP telah diterapkan secara prospektif untuk semua periode yang disajikan. Dampak transisi mencakup penyesuaian pada pos-pos utama laporan keuangan, seperti penyisihan penghapusan aset produktif dan penyesuaian estimasi pajak yang memengaruhi liabilitas pajak.

Perusahaan menggunakan pendekatan prospektif dan bukan retrospektif, hal ini dengan pertimbangan metode retrospektif tidak praktis diterapkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam sistem informasi.
2. Dampak perpajakan.
3. Penggunaan laba tahun lalu yang sudah digunakan.

c. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT BPR Hayura Artalola disusun dengan dasar akrual berdasarkan biaya historis sebagai pengukuran utama, dengan pengecualian nilai wajar untuk instrumen keuangan tertentu, biaya kini untuk aset biologis (jika relevan), nilai realisasi untuk aset nonkeuangan, dan nilai sekarang untuk liabilitas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika memiliki likuiditas tinggi dan akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Mata uang pelaporan adalah Rupiah, dan bahasa pelaporan adalah bahasa Indonesia.

Laporan keuangan lengkap entitas privat terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan,
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
3. Laporan perubahan ekuitas,
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto nomor 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991 yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal.
- Hubungan antara perusahaan dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari perusahaan tersebut.
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan atau dikendalikan oleh perusahaan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut.

Dalam kegiatan usahanya, BPR melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan Bab 33 SAK EP, yang mencakup identitas pihak berelasi, sifat hubungan, dan pengungkapan transaksi signifikan (seperti jenis, jumlah, syarat, dan jaminan). Transaksi diakui pada kondisi *arm's length* dan dievaluasi untuk dampak kesalahan penyajian. Pihak berelasi meliputi:

- (i) Dua entitas dengan direktur atau personel manajemen kunci yang sama, tetapi tidak memenuhi ketentuan pengendalian bersama atau signifikan;
- (ii) Dua venturer yang berbagi pengendalian bersama atas *joint venture*;
- (iii) Pihak-pihak dalam urusan normal yang memengaruhi BPR karena ketergantungan ekonomi, seperti penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan umum, departemen/instansi pemerintah, dan pelanggan/pemasok/distributor dengan volume transaksi signifikan.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tahun 2025 dan 2024 lihat catatan 28.

e. Giro pada bank lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada Bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan Bank.

f. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan pendapatan bunga dari aset keuangan seperti kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, termasuk dari penempatan pada bank lain. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

g. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain merupakan penempatan tagihan atau simpanan milik Bank pada bank lain untuk menunjang operasional, memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve* yang terdiri dari giro pada bank lain, tabungan pada bank lain dan deposito pada bank lain. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan perusahaan. Dalam hal perusahaan membentuk penyisihan terjadinya kerugian dan penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

i. Penyisihan dan Cadangan atas Aset Produktif (Lanjutan)

3) Kebijakan yang Berlaku Sebagai Pembanding (Tahun Buku 2024)

Pada tahun 2024, penyisihan atas aset produktif dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

j. Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Bab 17 SAK EP, dengan review periodik umur manfaat dan nilai residu. Aset tetap disusutkan mulai bulan pengeluaran dilakukan atau pekerjaan selesai dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomi aset. Persentase penyusutan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bukan bangunan:		
Kelompok I	4	25,00%
Kelompok II	8	12,50%
Kelompok III	16	6,25%
Kelompok IV	20	5,00%
Bangunan:		
Permanen	20	5,00%
Bukan permanen	10	10,00%

Sesuai dengan kebijakan manajemen, Bank telah membentuk kebijakan batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.000.000.

k. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri atas perangkat lunak komputer yang diperoleh dan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tak berwujud ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya yakni lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam tingkat amortisasi, masa manfaat atau nilai residual aset takberwujud, amortisasi direvisi secara prospektif untuk mencerminkan perkiraan yang baru.

l. Penurunan nilai aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap, dan aset tak berwujud ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset yang terpengaruh (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan estimasian adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasian dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

m Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan

Pajak tangguhan bisa berupa Aset Pajak Tangguhan untuk pemulihan pajak di masa depan atau kewajiban pajak tangguhan untuk pajak terhutang di masa depan.

Pajak tangguhan tersebut timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas perusahaan dalam laporan posisi keuangan dan jumlah yang dapat diatribusikan kepada aset dan liabilitas tersebut oleh otoritas perpajakan (perbedaan tersebut dinamakan perbedaan temporer), serta akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan saat ini.

o. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan pada akhir periode akuntansi.

p. Liabilitas Segera Dibayar

Kewajiban segera dibayar adalah kewajiban yang telah jatuh tempo atau segera dapat ditagih, termasuk utang pajak, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Kewajiban ini diakui dan diukur pada nilai nominal.

q. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

r. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*). Beban bunga diakui secara akrual sebesar jumlah kewajiban Bank, termasuk beban terkait penghimpunan dana seperti hadiah dan *cash back*.

s. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau memiliki jangka waktu tertentu ditangguhkan serta diamortisasi berdasarkan metode selama jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh tempo, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang ditangguhkan diakui penuh pada saat pelunasan.

t. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja adalah kompensasi atau manfaat yang diberikan Perusahaan kepada karyawan setelah mereka tidak lagi bekerja.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

t. Imbalan kerja (Lanjutan)

BPR telah melaksanakan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan Bab 28 SAK EP (program imbalan pasti dengan pengakuan liabilitas aktuarial berdasarkan masa kerja dan kompensasi), serta ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Imbalan pasca kerja dibayarkan kepada karyawan pada saat mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, atau cacat tetap, dengan besarnya berdasarkan masa kerja dan kompensasi pada saat penyelesaian hubungan kerja.

- 1) **Kewajiban Imbalan Pascakerja Jangka Pendek**
Kewajiban imbalan pascakerja jangka pendek adalah kewajiban Perusahaan untuk membayar imbalan pasca kerja kepada karyawan selama tahun berjalan.
- 2) **Kewajiban Imbalan Pascakerja Jangka Panjang**
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka Panjang adalah liabilitas Perusahaan untuk membayar manfaat kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. Pengakuan ini dihitung menggunakan metode actuarial, yang diukur berdasarkan nilai kini dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai liabilitas jangka panjang.

Perusahaan akan mengakui uang pesangon sebagai kewajiban dan beban hanya bilamana perusahaan mempunyai rencana pemutusan hubungan kerja formal dan tidak terdapat kemungkinan untuk membatalkannya.

Rencana pemutusan hubungan kerja mencakup :

- a. Jumlah karyawan serta fungsinya
- b. Jumlah uang pesangon untuk masing-masing karyawan
- c. Waktu melaksanakan rencana tersebut atau
- d. Menawarkan uang pesangon kepada karyawan agar mengundurkan diri secara sukarela

Bila terdapat karyawan mengundurkan diri diluar rencana pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan memahami kewajiban dan menjadi beban tahun berjalan yang dibayar secara tunai.

PT BPR Hayura Artalola untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut di atas, telah melaksanakan dengan cara membentuk tabungan DPLK pada Bank BNI dan kewajiban imbalan kerja lainnya. Posisi saldo pengembangan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp590.887.493 untuk DPLK BNI 46 dan JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp1.230.847.442

u. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah beban atau manfaat pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan saat ini tetapi akan dibayar atau dipulihkan di masa mendatang, timbul karena perbedaan sementara (*temporary differences*) antara laba komersial (akuntansi) dan laba fiskal (pajak) yang akan hilang seiring waktu. Lihat Catatan 2.n.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

v. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Estimasi akuntansi melibatkan asumsi masa depan yang berpotensi penyesuaian material, seperti:

1. Penyisihan kerugian kredit berdasarkan proyeksi risiko kredit nasabah, dengan jumlah tercatat Rp433.500.924,- dan risiko fluktuasi ekonomi.
2. Kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto dan umur harapan hidup, dengan kewajiban tercatat Rp1.821.734.935,-.

3. KAS

Saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Kas Teller	248.220.600	58.770.200
Jumlah	248.220.600	58.770.200

4. GIRO PADA BANK LAIN

Saldo rekening koran Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank lain, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Bank BNI LIK	3.061.320.112	2.297.772.801
Bank BJB Padalarang	505.403.008	5.869.938
Bank Central Asia	122.024.828	122.384.828
Bank BJB Soreang	45.792.129	4.545.265
Bank Rakyat Indonesia	35.588.813	35.517.713
Bank Niaga	11.027.329	11.387.328
Bank Danamon	4.003.241	6.002.735
Bank Negara Indonesia	2.032.081	2.332.081
Bank Mandiri	950.000	950.000
Jumlah	3.788.141.541	2.486.762.689

5. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan bunga yang masih akan diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2024	2023
Kredit Retail I	81.836.444	75.570.726
Kredit Retail II	454.702.615	370.773.236
Kredit Middle	121.615.606	105.281.154
Kredit Karyawan	9.936.843	9.752.580
Kredit Porsi Haji	439.418	566.461
Kredit Middle Special	155.858.795	101.843.193
Kredit Tanpa Agunan (KTA)	3.159.220	3.361.680
Kredit Motor Baru	1.977.853	-
Kredit Sertifikasi	13.980.527	8.026.500
Jumlah	843.507.321	675.175.530

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penanaman dana Bank dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tabungan		
Tabungan Danamon	1.924.167.765	1.964.848.550
Tabungan Bank Mandiri Kopo	2.109.780.354	2.057.705.158
Tabungan Bank Muamalat	171.207	531.205
BPR Karyajatnika Sadaya	366.616.396	671.879.424
Jumlah Tabungan	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>

Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas penempatan pada bank lain diklasifikasikan lancar.

Suku bunga penempatan pada Bank lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing 0,25%- 3,5% dan 0,25% - 3,5%.

Tabungan yang dijadikan jaminan/agunan dari pinjaman diterima, sebesar Rp15.900.000,- Pada tahun 2025 dan Rp0,- pada tahun 2024.

Penempatan pada bank lain, menurut jangka waktunya :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kurang dari 1 bulan	4.400.735.722	4.694.964.336
Jumlah	<u>4.400.735.722</u>	<u>4.694.964.336</u>

Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai penempatan pada Bank lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo awal	1.827.492	5.124.015
Penyisihan Periode Berjalan	72.325.818	67.241.276
Pemulihan CKPN	(68.293.058)	(70.537.799)
Saldo akhir	<u>5.860.252</u>	<u>1.827.492</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang wajib dibentuk	5.860.252	1.827.492
Persentase CKPN yang telah dibentuk terhadap CKPN yang wajib dibentuk	100%	100%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

Baki debit kredit per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri dari :
 Jenis kredit :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kredit Retail I	3.847.358.980	151.180.777	21.687.309	5.799.754	7.775.563	4.033.802.383
Kredit Retail II	19.134.695.008	1.320.567.512	154.455.210	114.732.017	98.872.478	20.823.322.225
Kredit Middle	6.367.401.115	278.482.075	-	13.392.385	127.825.440	6.787.101.015
Kredit Karyawan	1.771.379.992	-	-	-	-	1.771.379.992
Kredit MSR	5.240.207.245	1.136.377.692	55.862.668	164.912.559	212.623.357	6.809.983.521
Kredit Sertifikasi	697.154.983	-	-	-	-	697.154.983
Kredit Porsi Haji	33.476.722	-	-	-	-	33.476.722
Kredit Motor Baru	143.958.227	-	-	-	-	143.958.227
Kredit Tanpa Agunan	151.205.396	-	-	15.374.152	-	166.579.548
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

Sektor ekonomi :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pertanian	11.018.192.118	707.474.017	110.997.421	42.067.975	113.191.725	11.991.923.256
Perindustrian	2.488.141.820	731.569.365	36.780.641	18.650.354	30.648.745	3.305.790.925
Perdagangan	10.382.196.511	1.059.409.369	55.213.748	225.442.934	185.856.988	11.908.119.550
Jasa	3.161.286.621	72.078.153	26.443.978	3.069.095	9.256.173	3.272.134.020
Konsumtif	10.337.020.598	316.077.152	2.569.399	24.980.509	108.143.207	10.788.790.865
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

Jangka Waktu :

	2025					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kurang dari 1 tahun	26.813.734.054	837.926.835	25.286.592	-	-	27.676.947.481
1 - 5 tahun	10.573.103.614	2.048.681.221	206.718.595	314.210.867	447.096.838	13.589.811.135
Jumlah	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	41.266.758.616
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(431.806.641)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(62.400.724)
Total Kredit	37.386.837.668	2.886.608.056	232.005.187	314.210.867	447.096.838	40.772.551.251

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Jenis Kredit :

	2024					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kredit Retail I	3.832.190.641	83.184.297	11.997.671	4.477.809	52.311.203	3.984.161.621
Kredit Retail II	17.338.058.398	1.026.874.775	231.878.487	87.577.313	39.156.032	18.723.545.005
Kredit Middle	4.815.624.871	443.366.542	58.342.242	52.473.852	206.898.202	5.576.705.709
Kredit Karyawan	1.532.594.702	-	-	-	42.640.882	1.575.235.584
Kredit MSR	5.681.374.525	252.604.555	-	120.849.182	-	6.054.828.262
Kredit TOP	681.316.696	-	-	-	-	681.316.696
Kredit Porsi Haji	42.291.662	-	-	-	-	42.291.662
Kredit Tanpa Agunan	152.975.438	-	-	-	-	152.975.438
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Sektor Ekonomi :

	2024					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pertanian	9.418.094.963	644.519.278	167.208.838	72.398.437	52.311.203	10.354.532.719
Perindustrian	2.922.354.330	215.097.326	7.104.537	12.458.321	39.156.032	3.196.170.546
Perdagangan	10.325.015.879	700.194.258	84.014.512	40.174.169	206.898.202	11.356.297.020
Jasa	3.534.950.477	49.484.327	27.284.105	44.756.794	42.640.882	3.699.116.585
Konsumtif	7.876.011.284	196.734.980	16.606.408	95.590.435	-	8.184.943.107
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

Jangka Waktu :

	2024					Jumlah
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Kurang dari 1 tahun	664.683.773	200.000.000	-	-	-	864.683.773
1 - 5 tahun	33.411.743.160	1.606.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	35.926.376.204
Jumlah	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.791.059.977
Biaya Transaksi	-	-	-	-	-	3.113.463
Dikurangi : Provisi	-	-	-	-	-	(487.287.071)
Kredit Restrukturisasi	-	-	-	-	-	(23.769.680)
Total Kredit	34.076.426.933	1.806.030.169	302.218.400	265.378.156	341.006.319	36.283.116.689

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Dari jumlah kredit yang ada per 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut termasuk didalamnya kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp1.195.534.128,- dan sebesar Rp1.560.691.950,-.

Informasi pokok :

- a. Kredit dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh bank.
- b. Suku bunga kredit dalam rupiah periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 12% - 24% dan 12% - 18%
- c. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
- d. Kredit modal kerja diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja.
- e. Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk kesejahteraan yang dibebani bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 12% dan 12% dengan jangka waktu 5 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- f. Rasio Non-Performing Loan (NPL) perusahaan (secara bruto) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2,41% dan 2,47%.

Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo awal 01 Januari 2025 dan 2024	295.199.649	338.668.604
Penyisihan periode berjalan	2.101.232.107	542.926.822
Penghapusan kredit		-
Pemulihan	(1.962.930.832)	(586.395.777)
CKPN kredit yang telah dibentuk	<u>433.500.924</u>	<u>295.199.649</u>
CKPN kredit yang wajib dibentuk	433.500.924	295.199.649
Persentase CKPN yang telah dibentuk terhadap CKPN yang wajib dibentuk	100%	100%

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit tersebut.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

8. ASET TETAP

Saldo nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

2025				
Nilai Perolehan :	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	806.945.000	40.900.000	-	847.845.000
Inventaris Lainnya	164.686.434	10.726.350	-	175.412.784
Inventaris Peralatan kantor	461.064.144	41.503.979	-	502.568.123
Jumlah nilai perolehan	2.422.812.886	93.130.329	-	2.515.943.215
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	407.306.675	30.170.865	-	437.477.540
Kendaraan	375.493.459	94.497.917	-	469.991.376
Inventaris Lainnya	128.527.606	11.850.242	-	140.377.848
Inventaris Peralatan kantor	423.644.235	26.187.412	-	449.831.647
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.971.975	162.706.436	-	1.497.678.424
Nilai Buku	1.087.840.911			1.018.264.791

2024				
Nilai Perolehan :	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	386.700.000	-	-	386.700.000
Bangunan	603.417.308	-	-	603.417.308
Kendaraan	787.184.400	200.050.000	180.289.400	806.945.000
Inventaris Lainnya	127.409.900	37.276.534	-	164.686.434
Inventaris Peralatan kantor	453.299.544	7.764.600	-	461.064.144
Jumlah nilai perolehan	2.358.011.152	245.091.134	180.289.400	2.422.812.886
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	377.135.810	30.170.865	-	407.306.675
Kendaraan	443.412.026	112.370.833	180.289.400	375.493.459
Inventaris Lainnya	117.488.986	11.038.620	-	128.527.606
Inventaris Peralatan kantor	396.360.818	27.283.417	-	423.644.235
Jumlah akumulasi penyusutan	1.334.397.640	180.863.735	180.289.400	1.334.971.975
Nilai Buku	1.023.613.512			1.087.840.911

Penambahan kendaraan tahun 2024 sebesar Rp40.900.000,- merupakan pembelian 2 unit kantor kendaraan operasional 2025.

Beban penyusutan tahun 2025 dan 2024 dicatat pada kelompok beban penyisihan kerugian dan penyusutan masing - masing sebesar Rp162.706.436,- dan Rp180.863.735,-.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

9. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	Saldo Awal	Dikreditkan pada laba rugi	Penghasilan Komperhensif lain	Saldo Akhir
Cadangan biaya pendidikan	-	33.089.525	-	33.089.525
Biaya penyusutan	-	-	-	-
Biaya imbalan kerja	-	-	-	-
Jumlah	-	33.089.525	-	33.089.525

	Saldo Awal	Dikreditkan pada laba rugi	Penghasilan Komperhensif lain	Saldo Akhir
Cadangan biaya pendidikan	-	-	-	-
Biaya penyusutan	-	-	-	-
Biaya imbalan kerja	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

10. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Sewa gedung	133.874.170	49.848.605
Persediaan ATK/barang cetakan	28.738.372	25.597.200
Persediaan materai tempel/teraan/perangko	3.380.000	5.190.000
Persediaan Map dan buku tabungan (Pass Book)	11.925.000	10.600.000
PPOB Hayura VSI	29.007.647	37.947.468
Tagihan Settlement VA Bank	26.492.160	16.466.720
Tagihan Settlement Alfamart	2.428.600	6.761.500
Tagihan Settlement Indomaret	566.700	340.000
Uang Muka macam-macam biaya	15.000.000	-
Jumlah	<u>251.412.649</u>	<u>152.751.493</u>

11. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Asuransi	16.457.664	32.696.002
Notaris	14.525.000	4.750.000
Jumlah	<u>30.982.664</u>	<u>37.446.602</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

12. UTANG BUNGA

Utang bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bunga tabungan	1.887.109	1.716.501
Bunga deposito	43.730.767	38.712.619
Bunga pinjaman diterima	6.669.661	10.325.328
Bunga jatuh tempo	4.077.625	6.794.461
Jumlah	<u>56.365.162</u>	<u>57.548.909</u>

13. UTANG PAJAK

Utang pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PPh bunga tabungan	9.474.251	8.603.263
PPh bunga deposito	9.362.731	9.045.129
PPh pasal 25 dan 29	762.125.746	153.355.219
PPh pasal 21	61.328.300	4.746.677
PPh pasal 23	17.156	130.974
Jumlah	<u>842.308.184</u>	<u>175.881.262</u>

PPh pasal 25/29 sebesar Rp762.125.746 merupakan utang kekurangan pph pasal 29 Tahun 2025.

14. SIMPANAN

Saldo simpanan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tabungan	21.165.792.952	19.350.396.012
Deposito berjangka	15.529.600.000	13.547.600.000
Jumlah	<u>36.695.392.952</u>	<u>32.897.996.012</u>

Tabungan

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan periode 31 Desember 2025 dan 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar 3% - 4% per tahun dan 3% - 4% per tahun.

Jumlah tabungan yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank masing-masing sebesar Rp135.831.986 dan Rp123.807.000.

Terdapat tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp15.900.000, dan Rp0.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Deposito berjangka menurut jangka waktunya :		
1 bulan	250.000.000	500.000.000
3 bulan	7.505.000.000	5.679.500.000
6 bulan	4.807.300.000	4.240.000.000
12 bulan	2.967.300.000	3.128.100.000
Jumlah	<u>15.529.600.000</u>	<u>13.547.600.000</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

14. SIMPANAN (Lanjutan)

Jumlah deposito berjangka yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada Bank masing-masing sebesar Rp0. dan Rp150.000.000. Deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR masing-masing sebesar Rp0, dan Rp0. Tingkat suku bunga deposito berjangka periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing antara 3,75% - 6,25% dan 4% - 6,75%.

15. PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Pinjaman yang diterima lainnya - Bank lain :		
- BPR Karyajatnika Sadaya	2.528.874.924	4.130.131.338
Dikurangi :		
Biaya provisi	(22.857.136)	(39.999.988)
Biaya transaksi	(13.745.936)	(24.055.388)
Jumlah Pinjaman Diterima	2.492.271.852	4.066.075.962

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA

Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor : SPPK/017/Maret/2024 tanggal 17 Mei 2024

Kredit Rp 5.000.000.000
 Rp 4.000.000.000 KAB-LB 1
 Rp 1.000.000.000 KAB-LB 2

Keperluan Modal kerja BPR
 Bentuk KAB-LB SME
 Suku bunga 9% Efektif setara dengan 4.83% Flat
 Jangka Waktu 36 Bulan
 Jaminan - 1 Unit T/B di Jl. Raya Propinsi No. 139 Desa. Pasitrijambu, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung-SHGB No. 2 a.n PT. Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola (LT:389 m2, LB: 386.33 m2 masa berakhir hak guna bangunan : 06/12/2041)
 - Cessie Piutang Lancar 110% dari outstanding kredit

16. KEWAJIBAN LAIN – LAIN

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Cadangan pendidikan	150.406.931	141.747.958
Angsuran Bunga	-	5.203.162
Rekening selisih Kas	41.487.389	-
Lainya	22.920.000	17.935.000
Jumlah	214.814.320	164.886.120

Cadangan Pendidikan adalah dana cadangan Pendidikan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan POJK 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan kualitas sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah, yaitu sebesar 3% dari biaya personalia (biaya tenaga kerja) tahun lalu.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

17. MODAL

Modal Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Modal dasar	8.000.000.000	5.000.000.000
Modal belum ditempatkan dan disetor	(5.800.000.000)	(2.800.000.000)
Modal yang telah ditempatkan dan disetor	<u>2.200.000.000</u>	<u>2.200.000.000</u>

Modal disetor tersebut telah dicatat dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No.AHU-11809.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 07 Oktober 2010 dan telah dicatat dalam administrasi bank Indonesia dengan surat No.12/655/DKBU/IDAd/Bd tanggal 26 Mei 2010. Perubahan komposisi penambahan modal disetor tahun 2010 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas Bank Indonesia sesuai dengan surat Nomor :13/86/DKBU/IDAd/Bd tanggal 25 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola No 12 Tanggal 31 Oktober 2025 pada notaris Janti Rahmajanti, S.H, menyetujui perubahan modal dasar dari sebesar Rp. 5.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000.

Selanjutnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0077380.AH.01.02.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Hayura Artalola pada tanggal 19 Februari 2025 No 03, menyetujui jual beli saham Perseroan Terbatas dari ahli waris almarhum Dedi Rusami dengan demikian, komposisi saham BPR menjadi :

Nama Pemegang Saham	2025			2024		
	%	Lembar	Nominal	%	Lembar	Nominal
H. Mutiq Yusmita Hadyat	47	20.540	1.027.000.000	47	20.540	1.027.000.000
Hj. Gusti Nurmahrita	51	22.380	1.119.000.000	51	22.380	1.119.000.000
Dedi Rusamsi	-	-	-	2	1.080	54.000.000
Tata Suratman	1	540	27.000.000	-	-	-
Teulis Ratna Komala	1	540	27.000.000	-	-	-

Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cadangan umum	1.040.000.000	1.040.000.000
	<u>1.040.000.000</u>	<u>1.040.000.000</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

18. PENDAPATAN BUNGA

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Penempatan pada bank lain	63.524.611	58.311.863
Kredit yang diberikan	13.003.766.561	9.223.144.120
Bunga lainnya	430.079.650	435.060.150
Jumlah Bunga Yang Diperoleh	<u>13.497.370.823</u>	<u>9.716.516.133</u>
Provisi dan komisi per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:		
Modal kerja	565.261.742	478.967.396
Bunga kredit - adm	(676.400)	(859.869)
Jumlah Provisi dan Komisi	<u>564.585.342</u>	<u>478.107.527</u>

19. BEBAN BUNGA

Beban bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pihak ketiga bank lain		
Beban bunga deposito	418.384.011	408.662.133
Beban bunga pinjaman diterima	303.073.519	253.448.266
Beban bunga ABP lainnya	7.287.600	7.394.900
Jumlah Beban Bunga Pihak Ketiga Bank Lain	<u>728.745.130</u>	<u>669.505.299</u>

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pihak ketiga		
Beban bunga tabungan	535.490.109	507.948.730
Beban bunga deposito	516.464.137	497.127.798
Beban bunga pinjaman diterima	-	-
Beban bunga provisi	17.142.852	10.000.012
Beban bunga biaya transaksi	10.309.452	6.013.928
Beban bunga pihak ketiga lainnya	65.361.549	67.659.269
Jumlah Beban Pihak Ketiga	<u>1.144.768.099</u>	<u>1.088.749.737</u>
Jumlah Beban Bunga	<u>1.873.513.229</u>	<u>1.758.255.036</u>

20. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tabungan/deposito	69.270.059	69.359.872
Denda kredit	155.406.613	155.642.267
Penghapusan kredit diberikan	5.009.427	4.077.800
Pemulihan Aktiva Produktif	1.910.351.906	573.923.902
Payment Point	4.818.895	5.997.106
Pinalti	570.786	545.228
Administrasi lainnya	8.922.800	8.896.400
Lainnya	65.740.214	49.347.497
Jumlah	<u>2.220.090.699</u>	<u>867.790.072</u>

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

21. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

Beban penyisihan kerugian/penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Penyisihan		
- Bank Non Giro	72.325.818	67.241.276
- Kredit yang diberikan	2.101.232.107	542.926.822
Jumlah beban penyisihan aset produktif	<u>2.173.557.925</u>	<u>610.168.098</u>
Penyusutan		
- Beban penyusutan aset tetap	162.706.482	180.863.699
Jumlah beban penyusutan aset tetap	<u>162.706.482</u>	<u>180.863.699</u>
Jumlah beban penyisihan/penyusutan	<u>2.336.264.408</u>	<u>791.031.797</u>

22. BEBAN PEMASARAN

Beban pemasaran per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban promosi dan iklan	89.984.700	118.924.635
Jumlah Beban Pemasaran	<u>89.984.700</u>	<u>118.924.635</u>

23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Beban administrasi dan umum merupakan beban karyawan, beban administrasi dan umum dan beban operasional lainnya terdiri dari :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban karyawan	5.112.526.139	5.013.564.382
Beban pendidikan	184.472.695	156.339.198
Beban sewa	77.792.961	75.257.725
Beban premi asuransi	208.777.419	224.986.979
Beban barang dan jasa	419.194.348	376.970.809
Pajak (kendaraan & lainnya)	12.830.000	19.011.782
Beban pemeliharaan dan perbaikan	338.516.114	347.387.805
Beban operasional lainnya	62.987.132	63.322.769
Jumlah	<u>6.417.096.808</u>	<u>6.276.841.449</u>

Beban karyawan sebesar Rp5.112.526.139 termasuk di dalamnya setoran JHT (Jaminan Hari Tua) pada BPJS Ketenagakerjaan dan setoran DPLK.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

24. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan non operasional :		
Selisih kas	9.449	11.112
Lainnya	5.729.428	79.676.238
Jumlah pendapatan non operasional	<u>5.738.877</u>	<u>79.687.350</u>
Beban non operasional :		
Beban sumbangan/hadiah	9.150.000	45.144.800
Beban selisih kas	10.969	10.014
Lainnya	74.759.750	28.643.700
Jumlah beban non operasional	<u>83.920.719</u>	<u>73.798.514</u>
Jumlah	<u>(78.181.842)</u>	<u>5.888.836</u>

25. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara laba komersil sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	5.487.005.878	2.123.249.651
Beda tetap:		
- Pendapatan Tabungan dan Deposito	(63.524.611)	(69.359.872)
- Beban operasional lainnya	62.987.132	63.322.769
- Beban sumbangan	9.150.000	45.144.800
- Biaya non operasional lainnya	10.969	10.014
- Beban Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain	14.395	
- Biaya lain-lainnya	74.759.750	28.643.700
Jumlah	<u>83.397.635</u>	<u>67.761.411</u>
Beda Waktu:		
- Cadangan biaya pendidikan	150.406.931	14.683.798
Jumlah	<u>150.406.931</u>	<u>14.683.798</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	5.720.810.443	2.205.694.860
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	5.720.810.443	2.205.694.860

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

25. BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{array}{r} 4.800.000.000 \\ 16.287.785.741 \end{array} \times 5.720.810.443 = 1.685.919.164$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$5.720.810.443 - 1.685.919.164 = 4.034.891.279$$

Pajak penghasilan 2025

$$\begin{array}{r} 50\% \times 22\% \times 1.685.919.164 = 185.451.108 \\ 22\% \times 4.034.891.279 = 887.676.081 \end{array}$$

Jumlah pajak penghasilan

Pajak dibayar dimuka-PPH Pasal 25
 (Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29

$$\begin{array}{r} \underline{1.073.127.189} \\ (311.001.443) \\ \underline{\underline{762.125.746}} \end{array}$$

Pajak penghasilan 2024

$$\begin{array}{r} 50\% \times 22\% \times 950.209.951 = 104.523.095 \\ 22\% \times 1.255.484.909 = 276.206.680 \end{array}$$

Jumlah pajak penghasilan

Pajak dibayar dimuka-PPH Pasal 25
 (Kelebihan) kekurangan PPh Pasal 29

$$\begin{array}{r} \underline{380.729.774} \\ (227.374.556) \\ \underline{\underline{153.355.218}} \end{array}$$

Pada tahun 2021, tarif perhitungan PP badan berubah menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

26. Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan

	2025	2024
Cadangan biaya pendidikan	33.089.525	-
Jumlah	33.089.525	-

27. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Aset kontinjensi	2025	2024
Bunga kredit yang diberikan	461.486.421	389.892.936
Aset produktif yang dihapus buku	882.652.395	819.250.053
Jumlah aset komitmen dan kontinjensi	1.344.138.815	1.209.142.988

28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usahanya, PT BPR Hayura Artalola melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan karyawan kunci Bank dan pemegang saham antara lain sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan istimewa	Transaksi
H. Mutiq Yusmita Hadyat	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Hj. Gusti Nurmahrita	Pemegang Saham	Kredit dan Tabungan
Tatan Suratman	Komisaris dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Teulis Ratna Komala	Direksi dan Pemegang saham	Kredit dan Tabungan
Usep Subhan	Direksi	Kredit dan Tabungan

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta persentasenya terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.195.534.128 dan Rp1.102.500.008 dengan presentase terhadap modal inti dan modal pelengkap sebesar 5,72% dan 16,38%.
- b. Deposito berjangka diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp150.000.000 dengan presentase terhadap jumlah simpanan deposito sebesar 0% dan 0,52%.
- c. Tabungan yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp135.831.986 dan Rp123.807.000 dengan presentase terhadap jumlah simpanan tabungan sebesar 1,16% dan 0,43%.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban pada Bank-bank lokal. Dan untuk Pelaksanaan Program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebankan premi berkaitan dengan program penjaminan tersebut sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

30. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan POJK Nomer 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penertapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pengendalian Intern
- Sistem Informasi Management
- Sumber Daya Manusia

Direksi bertanggung jawab atas penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	ATMR
1. Kas	248.220.600	0%	-
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0%	-
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	636.966.688	0%	-
4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	-	15%	-
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	8.142.913.927	20%	1.628.582.785,40
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.			
a. Kredit kepada bank lain	-	20%	-
b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	20%	-
c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	20%	-
d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	20%	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	20%	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	9.017.496.919	30%	2.705.249.075,70
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20 %.			
a. Kredit Kepada BUMN/BUMD	-	50%	-
b. Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50%	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan.	-	50%	-
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	3.184.463.577	50%	1.592.231.788,50
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	18.786.695.376	70%	13.150.686.763,20
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu	741.952.644	70%	519.366.850,80
15. Tagihan atau kredit lainnya yg tidak memenuhi kriteria bobot resiko diatas	8.943.099.895	100%	8.943.099.895,00
16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet			
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	22.655.155	100%	22.655.155,00
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	241.017.829	100%	241.017.829,00
17. Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud	1.018.264.791	100%	1.018.264.791,00
18. Agunan yang diambilalih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	100%	-
19. Aset lainnya selain tersebut di atas.	1.094.919.970	100%	1.094.919.970,00
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum	-	0%	-
Selisih lebih PPAP Umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/	-	-	-
Jumlah ATMR	52.078.667.371	0%	30.916.074.904

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (Lanjutan)
b. Rasio Kecukupan Modal

Komponen Permodalan	Jumlah Setiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah
MODAL	-	0%	-
1. MODAL INTI	-	0%	-
1.1 Modal Inti Utama	-	0%	-
1.1.1 Modal Disetor	2.200.000.000	100%	2.200.000.000
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal	-	0%	-
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100%	-
1.1.2.2 Dana Setoran Modal Ekuitas	-	100%	-
1.1.2.3 Modal Sumbangan	-	100%	-
1.1.2.4 Cadangan Umum	440.000.000	100%	440.000.000
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	-	100%	-
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	3.497.458.876	100%	3.497.458.876
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun berjalan	5.487.020.273	0%	-
1.1.2.7.1 Kekurangan Pembentukan PPAP -/-	-	0%	-
1.1.2.7.2 Taksiran hutang PPh dalam Laba -/-	1.027.975.000	0%	-
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi PPAP (maks 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	4.446.968.213	50%	2.223.484.107
1.1.2.9 Pajak tangguhan (deferred tax) -/-	-	100%	-
1.1.2.10 Goodwill -/-	-	100%	-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah bangunan dan rumah	-	0%	-
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	50%	-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	75%	-
1.1.2.11.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	100%	-
1.1.2.12 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya	-	0%	-
1.1.2.12.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	50%	-
1.1.2.12.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	100%	-
Sub Total Cadangan Tambahan Modal	-	0%	6.160.942.983
Sub Total Modal Inti Utama	-	0%	8.360.942.983
1.2 Modal Inti Tambahan	-	100%	-
1.3 JUMLAH MODAL INTI (1.1 + 1.2)	-	0%	8.360.942.983
2. MODAL PELENGKAP	-	0%	-
2.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	0%	-
2.2 Keuntungan Revaluasi aktiva tetap	-	100%	-
2.3 PPAP Umum yang wajib dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP Umum)	178.680.867	100%	178.680.867
2.4 Jumlah modal pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (2.1 + 2.2 + 2.3))	-	0%	178.680.867
JUMLAH MODAL (1 + 2)	-	0%	8.539.623.850
Rasio KPMM (Modal / ATMR)	-	-	27,04%
Batas Maksimum pemebrian Kredit	$\frac{4.446.968.213}{2.200.000.000} \times 100\% =$	-	202,13%

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (Lanjutan)
 c. Kualitas Aktiva Produktif

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Kredit	Surat Berharga	Penempatan pada Bank Lain	Jumlah
1. Aktiva Produktif				
- Lancar	37.386.837.668	-	8.188.877.263	45.575.714.931
- Dalam Perhatian Khusus	2.886.608.056	-	-	2.886.608.056
- Kurang Lancar	232.005.187	-	-	232.005.187
- Diragukan	314.210.867	-	-	314.210.867
- Macet	447.096.838	-	-	447.096.838
Jumlah	41.266.758.616	-	8.188.877.263	49.455.635.879
2. Aktiva Produktif				
Yang Diklasifikasikan				
- Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
- Kurang Lancar (50%)	232.005.187	-	-	232.005.187
- Diragukan (75%)	314.210.867	-	-	314.210.867
- Macet (100%)	447.096.838	-	-	447.096.838
Jumlah	993.312.892	-	-	993.312.892
3. PPAWD				
- Lancar (0,5%)	173.666.248	-	5.860.252	179.526.500
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	16.645.292	-	-	16.645.292
- Kurang Lancar (10%)	3.635.036	-	-	3.635.036
- Diragukan (50%)	39.321.196	-	-	39.321.196
- Macet (100%)	206.079.009	-	-	206.079.009
Jumlah	439.346.781	-	5.860.252	445.207.033
Rasio - Rasio	a. $\frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\% =$			2,01%
	b. $\frac{\text{Penyisihan penghapusan Aktiva produktif}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\% =$			100%

d. Aset Tetap Terhadap Modal

$$\frac{1.018.264.791}{2.200.000.000} \times 100\% = 46,28\%$$

PT BPR HAYURA ARTALOLA
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)

29. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (Lanjutan)
 e. Loan to Deposit Ratio

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Nominal	Persentase (%)
1. Simpanan Pihak Ke III		
1.1 Simpanan Berjangka	5.800.000.000	32,59%
1.2 Tabungan	21.165.792.952	46,55%
2. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan*	2.528.874.924	
3. Modal Pinjaman	-	-
4. Modal Inti	8.360.942.983	16,52%
5. Jumlah Dana Pihak Ke III	37.855.610.859	95,67%
6. Aktiva Produktif		
6.1 Kredit yang diberikan**	41.266.758.616	100%
6.2 Kredit yang diberikan kepada bank lain**	-	-
6.3 Lainnya	-	-
7. Jumlah Aktiva Produktif	41.266.758.616	
8. LDR $(6(1+2+3) : 5) \times 100\%$	109,01%	

f. Return on Asset (ROA)

$$\frac{5.487.005.878}{50.916.562.223} \times 100\% = 10,78\%$$

g. Return on Earning (ROE)

$$\frac{5.487.005.878}{8.539.623.850} \times 100\% = 64,25\%$$

h. Cash Ratio

$$\frac{8.437.097.863}{30.930.453.240} \times 100\% = 27,28\%$$

i. Beban Operasional Pendapatan Operasional

$$\frac{10.716.844.750}{16.282.046.860} \times 100\% = 65,82\%$$

30. INFORMASI LAIN

Kredit tahun 2025 mengalami pertumbuhan dari posisi tahun 2024 sebesar 10,85% dan dana pihak ketiga tumbuh hanya 0,07% hambatan karena usaha yang mengalami kontraksi, resiko kredit yang meningkat membuat BPR harus selektif dalam memberikan kredit. Disamping itu, BPR menjaga likuiditas yang kondisinya terbatas karena dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito juga masih tertekan.

Secara keseluruhan total aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp 50.916.562.223 mengalami kenaikan sebesar 11,34%, dibandingkan total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.142.354.726.

31. INFORMASI PENTING DAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat informasi penting dan peristiwa setelah tanggal neraca.

PT BPR HAYURA ARTALOLA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang diselesaikan masing-masing pada bulan Februari 2026 dan 2025.